



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KEUANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
(AUDITED)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
TANGGAL 31 DESEMBER 2011  
TAHUN ANGGARAN 2011



**BAGIAN ANGGARAN 077**

# **BAGIAN ANGGARAN 077**



## **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

### **LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2011 TAHUN ANGGARAN 2011 *(AUDITED)***

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110  
PO. Box. 999 JKT 10000 Telpn : (021) 2352-9000 Faks. (021) 352-0177

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp793.329.239,- atau 138,79% dari target penerimaan yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp571.617.000,-. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp237.171.272.844,- atau 82,35% dari rencana belanja yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp287.996.206.000,-
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia per 31 Desember 2011. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp511.540.329.989,- dan Kewajiban sebesar Rp103.163.990,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp511.437.165.999,-

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

Kami menyadari bahwa laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 12 Maret 2012

↓  
**SEKRETARIS JENDERAL,**



**JANEDJRI M. GAFFAR**

**NIP. 19631025 198802 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik .....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Daftar Singkatan.....	ix
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan .....	x
Pernyataan Tanggung Jawab .....	xii
Pernyataan Telah Direviu .....	xiii
I. Ringkasan.....	1
II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRAKT perbandingan 2011 dan 2010).....	4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2011 dan 2010) .....	7
IV. Catatan atas Laporan Keuangan .....	9
A. Penjelasan Umum .....	9
A.1. Dasar Hukum.....	9
A.2. Kebijakan Teknis Mahkamah Konstitusi RI .....	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	23
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran .....	23
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	23
B.3. Catatan Penting Lainnya.....	33
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	33
C.1. Penjelasan Umum Neraca.....	33
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca.....	34
C.3. Catatan Penting Lainnya .....	56
D. Pengungkapan Penting Lainnya.....	56
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.....	56
D.2. Rekening Pemerintah .....	57
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.....	57
D.4. Pengungkapan Lain – Lain .....	58
Laporan-laporan Pendukung sesuai <i>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65/PB/2010</i>	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
• Laporan Barang Pengguna Tahunan	
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	
Lampiran-lampiran lainnya sebagai Pendukung CaLK	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	16
Tabel 2	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 .....	17
Tabel 3	Perbandingan Realisasi Belanja Per Klasifikasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	17
Tabel 4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program Tahun Anggaran 2011.....	17
Tabel 5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara serta Belanja Tahun Anggaran 2011 .....	23
Tabel 6	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 .....	23
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	24
Tabel 8	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011 .....	26
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	27
Tabel 10	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011.....	28
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	29
Tabel 12	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 .....	29
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	30
Tabel 14	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 .....	31
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	32
Tabel 16	Perbandingan Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	34
Tabel 17	Perbandingan Nilai Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 2010.....	35
Tabel 18	Perbandingan Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010..	35
Tabel 19	Perbandingan Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 0 .....	36
Tabel 20	Perbandingan Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2011 dan 2010.....	36
Tabel 21	Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	37
Tabel 22	Daftar Persediaan per 31 Desember 2011 .....	37
Tabel 23	Perbandingan Nilai Jenis Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	37
Tabel 24	Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	38
Tabel 25	Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2011 .....	39

Tabel 26	Perbandingan Nilai Tanah per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	39
Tabel 27	Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2011 .....	41
Tabel 28	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010 ..	41
Tabel 29	Perbandingan Rincian Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010.....	41
Tabel 30	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 .....	43
Tabel 31	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 dan 2010	44
Tabel 32	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 .....	45
Tabel 33	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	46
Tabel 34	Perbandingan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 ....	46
Tabel 35	Perbandingan Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	47
Tabel 36	Perbandingan Nilai KDP per 31 Desember 2011 dan 2010.....	48
Tabel 37	Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	49
Tabel 38	Perbandingan Rincian Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010.	49
Tabel 39	Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	50
Tabel 40	Perbandingan Nilai Aset Lain - Lain per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	51
Tabel 41	Perbandingan Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 2010.....	51
Tabel 42	Perbandingan Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 dan 2010.....	52
Tabel 43	Perbandingan Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	52
Tabel 44	Perbandingan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010	53
Tabel 45	Perbandingan Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	53
Tabel 46	Perbandingan Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	54
Tabel 47	Perbandingan Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010.....	54
Tabel 48	Perbandingan Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	55

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2011 .....	24
Grafik 2	Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	25
Grafik 3	Perbandingan Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 .... dan 2010 .....	26
Grafik 4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011 .....	26
Grafik 5	Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011 .....	27
Grafik 6	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	27
Grafik 7	Perbandingan Anggaran & Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 .....	28
Grafik 8	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	29
Grafik 9	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 .....	30
Grafik 10	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	31
Grafik 11	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 .....	32
Grafik 12	Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dan 2010 .....	33
Grafik 13	Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	34
Grafik 14	Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	38
Grafik 15	Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	39
Grafik 16	Perbandingan Tanah per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	40
Grafik 17	Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	42
Grafik 18	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	44
Grafik 19	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	46
Grafik 20	Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	48
Grafik 21	Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Pendukung sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010
  - a. LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
  - b. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja
  - c. Neraca Percobaan
2. Laporan Barang Pengguna
  - a. Laporan Barang Pengguna Tahunan
  - b. Daftar Kondisi Barang Rusak Berat dan Rusak Ringan
3. Lampiran Laporan Rekening Pemerintah
  - a. Monitoring Penutupan Rekening Mahkamah Konstitusi RI
  - b. Daftar Rekening Mahkamah Konstitusi RI TA 2011
4. Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK
  - a. Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi RI TA 2010
  - b. Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi RI TA 2010
5. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
  - a. Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan
  - b. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Keuangan RI
  - c. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data Laporan Keuangan Satuan Kerja Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I
  - d. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2011 antara Bagian Perlengkapan dengan Bagian Keuangan pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI (Audited)
  - e. Surat Edaran Menteri Keuangan RI tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011
  - f. Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian Tanah dan Bangunan antara Mahkamah Konstitusi RI dan Koperasi Konstitusi
  - g. Surat Terkait Pengalihan Aset atas Kapitalisasi Pemeliharaan Rumah Jabatan Hakim Konstitusi milik Sekretariat Negara
  - h. Capaian Kinerja Mahkamah Konstitusi

- i. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas
- j. Rekapitulasi Daftar Utang Belanja Pegawai TA 2011
- k. Laporan Persediaan
- l. Berita Acara Stock Opname Persediaan Bahan ATK, Bahan Publikasi, dan Obat Poliklinik per 31 Desember 2011
- m. Daftar Tanah Mahkamah Konstitusi RI
- n. Daftar Gedung dan Bangunan Mahkamah Konstitusi RI
- o. Daftar Peralatan dan Mesin yang Direklasifikasi ke Aset Lain-Lain
- p. Daftar Belanja Barang yang Dikapitalisasi ke Peralatan dan Mesin
- q. Daftar Belanja Barang yang Dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan
- r. Daftar Peralatan dan Mesin yang Direklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
- s. Daftar Peralatan dan Mesin yang Dikoreksi Nilai Aset
- t. Daftar Aset Tak Berwujud yang Dikoreksi Nilai Aset
- u. Daftar Gedung dan Bangunan yang Dikoreksi Nilai Aset
- v. Daftar BMN Hasil Migrasi SIMAK

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
SSBP	: Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	: Surat Setoran Pengembalian Belanja
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAS	: Bagan Akun Standar
UAK	: Unit Akuntansi Keuangan
UAB	: Unit Akuntansi Barang
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

**INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>LAPORAN REALISASI APBN</b>			<b>Halaman</b>
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>			
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah .....	23
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	24
<b>Belanja Negara</b>			
Catatan	B.2.2	Belanja Negara .....	25
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat .....	26
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai .....	28
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang .....	29
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal .....	31
<b>NERACA</b>			
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Catatan	C.2.1	Kas di bendahara Pengeluaran .....	34
Catatan	C.2.2	Piutang Bukan Pajak .....	35
Catatan	C.2.3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak .....	36
Catatan	C.2.4	Piutang Bukan Pajak (Netto) .....	36
Catatan	C.2.5	Persediaan .....	36
<b>Aset Tetap</b>			
Catatan	C.2.6	Aset Tetap .....	38
Catatan	C.2.6.1	Tanah .....	39
Catatan	C.2.6.2	Peralatan dan Mesin .....	41
Catatan	C.2.6.3	Gedung dan Bangunan .....	43
Catatan	C.2.6.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	45
Catatan	C.2.6.5	Aset Tetap Lainnya .....	46
Catatan	C.2.6.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) .....	48
<b>Aset Lainnya</b>			
Catatan	C.2.7	Aset Lainnya .....	48
Catatan	C.2.7.1	Aset Tak Berwujud .....	50
Catatan	C.2.7.2	Aset Lain-Lain .....	51

## KEWAJIBAN

### Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.8	Utang Kepada Pihak Ketiga .....	51
Catatan	C.2.9	Pendapatan Diterima Dimuka.....	52

## EKUITAS

### Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.10	Cadangan Piutang.....	52
Catatan	C.2.11	Cadangan Persediaan.....	53
Catatan	C.2.12	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek .....	53
Catatan	C.2.13	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan .....	53

### Ekuitas Dana Investasi

Catatan	C.2.14	Diinvestasikan dalam Aset Tetap.....	54
Catatan	C.2.15	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya .....	54

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
SEKRETARIS JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Maret 2012  
↓ **SEKRETARIS JENDERAL,**



↓ **JANEDJRI M. GAFFAR**  
**NIP. 19631025 198802 1 001**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

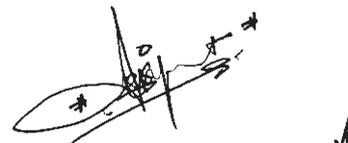
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2011 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Jakarta, 12 Maret 2012

**Satuan Pengawas Intern  
Ketua**



**Idris Yunisir Nasution**  
**NIP. 19620625 198402 1 001**

## **RINGKASAN**

## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode *1 Januari s.d. 31 Desember 2011*.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011, seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp793.329.239,- atau mencapai 138,79% dari anggaran.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp237.171.272.844,- atau mencapai 82,35% dari anggarannya. Jumlah Realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)			
	Tahun Anggaran 2011 (Rp)		Tahun Anggaran 2010 (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	571.617.000	793.329.239	478.108.000	640.542.262
Belanja Rupiah Murni	287.996.206.000	237.171.272.844	189.296.606.000	169.681.218.420

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan tahun sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp511.540.329.989,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.509.971.933,- Aset Tetap sebesar Rp500.917.178.615,- dan Aset

Lainnya sebesar Rp9.113.179.441,-

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp103.163.990,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp511.437.165.999,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.406.807.943,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp510.030.358.056,-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		(dalam rupiah)
	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)	Nilai kenaikan/ (penurunan)
<b>Aset</b>	<b>511.540.329.989</b>	<b>485.460.894.224</b>	<b>26.079.435.765</b>
Aset Lancar	1.509.971.933	1.704.525.837	(194.553.904)
Aset Tetap	500.917.178.615	477.125.286.670	23.791.891.945
Aset Lainnya	9.113.179.441	6.631.081.717	2.482.097.724
<b>Kewajiban</b>	<b>103.163.990</b>	<b>186.978.566</b>	<b>(83.814.576)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	103.163.990	186.978.566	(83.814.576)
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>511.437.165.999</b>	<b>485.273.915.658</b>	<b>26.163.250.341</b>
Ekuitas Dana Lancar	1.406.807.943	1.517.547.271	(110.739.328)
Ekuitas Dana Investasi	510.030.358.056	483.756.368.387	26.273.989.669

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
*(FACE REPORT)*

**PERBANDINGAN TAHUN 2011 DAN 2010**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN 3	REALISASI 4	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN 5	% REALISASI ANGGARAN 6	ANGGARAN 7	REALISASI 8	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN 9	% REALISASI ANGGARAN 10
<b>1</b>	<b>2</b>								
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>								
<b>A.1</b>	<b>PENERIMAAN DALAM NEGERI</b>	<b>571.617.000</b>	<b>793.329.239</b>	<b>221.712.239</b>	<b>138,79</b>	<b>478.108.000</b>	<b>640.542.262</b>	<b>162.434.262</b>	<b>133,97</b>
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	571.617.000	793.329.239	221.712.239	138,79	478.108.000	640.542.262	162.434.262	133,97
<b>A.2</b>	<b>HIBAH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>571.617.000</b>	<b>793.329.239</b>	<b>221.712.239</b>	<b>138,79</b>	<b>478.108.000</b>	<b>640.542.262</b>	<b>162.434.262</b>	<b>133,97</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>								
<b>B.1</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>	<b>287.996.206.000</b>	<b>237.171.272.844</b>	<b>(50.824.933.156)</b>	<b>82,35</b>	<b>189.296.606.000</b>	<b>169.681.218.420</b>	<b>(19.615.387.580)</b>	<b>89,64</b>
	Belanja Pegawai	12.107.924.000	10.807.804.808	(1.300.119.192)	89,26	10.271.280.000	9.533.364.904	(737.915.096)	92,82
	Belanja Barang	203.407.076.000	198.761.957.421	(4.645.118.579)	97,72	164.110.326.000	147.412.186.944	(16.698.139.056)	89,83
	Belanja Modal	72.481.206.000	27.601.510.615	(44.879.695.385)	38,08	14.915.000.000	12.735.666.572	(2.179.333.428)	85,39
	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>PINJAMAN LUAR NEGERI</b>								
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2011			2010			% REALISASI ANGGARAN 10
		ANGGARAN 3	REALISASI 4	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN 5	% REALISASI ANGGARAN 6	ANGGARAN 7	REALISASI 8	
<b>B.3</b>	<b>HIBAH</b>							
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>287.996.206.000</b>	<b>237.171.272.844</b>	<b>(50.824.933.156)</b>	<b>82,35</b>	<b>189.296.606.000</b>	<b>169.681.218.420</b>	<b>(19.615.387.580)</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							<b>89,64</b>
<b>C.1</b>	<b>PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETTO)</b>							
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
<b>C.2</b>	<b>PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETTO)</b>							
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Jakarta, 12 Maret 2012  
↓  
SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR  
NIP. 19631025 198802 1 001

**NERACA (*FACE REPORT*)**  
**PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

**N E R A C A**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**  
**(Audited)**

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN ( PENURUNAN )	
	31 Des 2011	31 Des 2010	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>A S E T</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0,00
Piutang Bukan Pajak	34.894.202	0	34.894.202	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(174.471)	0	(174.471)	0,00
<b>Piutang Bukan Pajak (Netto)</b>	<b>34.719.731</b>	<b>0</b>	<b>34.719.731</b>	<b>0,00</b>
Persediaan	1.475.252.202	1.704.525.837	(229.273.635)	(13,45)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.509.971.933</b>	<b>1.704.525.837</b>	<b>(194.553.904)</b>	<b>(11,41)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	89.075.216.326	77.368.883.316	11.706.333.010	15,13
Peralatan dan Mesin	171.177.014.723	116.169.156.176	55.007.858.547	47,35
Gedung dan Bangunan	187.136.608.095	268.370.367.977	(81.233.759.882)	(30,27)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.031.009.925	1.771.272.060	37.259.737.865	2.103,56
Aset Tetap Lainnya	13.838.650.246	13.445.607.141	393.043.105	2,92
Konstruksi Dalam Pengerjaan	658.679.300	0	658.679.300	0,00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>500.917.178.615</b>	<b>477.125.286.670</b>	<b>23.791.891.945</b>	<b>4,99</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tidak Berwujud	5.479.346.974	3.625.357.250	1.853.989.724	51,14
Aset Lain-lain	3.633.832.467	3.005.724.467	628.108.000	20,90
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>9.113.179.441</b>	<b>6.631.081.717</b>	<b>2.482.097.724</b>	<b>37,43</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>511.540.329.989</b>	<b>485.460.894.224</b>	<b>26.079.435.765</b>	<b>5,37</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	10.055.990	93.870.566	(83.814.576)	(89,29)
Pendapatan Diterima di Muka	93.108.000	93.108.000	0	0,00
Uang Muka dari KPPN	0	0	0	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>103.163.990</b>	<b>186.978.566</b>	<b>(83.814.576)</b>	<b>(44,83)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>103.163.990</b>	<b>186.978.566</b>	<b>(83.814.576)</b>	<b>(44,83)</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>				
Cadangan Piutang	34.719.731	0	34.719.731	0,00
Cadangan Persediaan	1.475.252.202	1.704.525.837	(229.273.635)	(13,45)
Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utang	(10.055.990)	(93.870.566)	83.814.576	(89,29)
Barang / Jasa yg Masih Harus Diserahkan	(93.108.000)	(93.108.000)	0	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>1.406.807.943</b>	<b>1.517.547.271</b>	<b>(110.739.328)</b>	<b>(7,30)</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	500.917.178.615	477.125.286.670	23.791.891.945	4,99
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9.113.179.441	6.631.081.717	2.482.097.724	37,43
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>510.030.358.056</b>	<b>483.756.368.387</b>	<b>26.273.989.669</b>	<b>5,43</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>511.437.165.999</b>	<b>485.273.915.658</b>	<b>26.163.250.341</b>	<b>5,39</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>511.540.329.989</b>	<b>485.460.894.224</b>	<b>26.079.435.765</b>	<b>5,37</b>

Jakarta, 12 Maret 2012  
**SEKRETARIS JENDERAL,**



**JANEDJRI M. GAFFAR**  
**NIP. 19631025 198802 1 001**

**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

**(CaLK)**

**TAHUN ANGGARAN 2011**  
*(Audited)*

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### **A. 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-62/PB/2009 Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

*Dasar Hukum*

#### **A.2 KEBIJAKAN TEKNIS MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI**

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi tahun 2010 s.d 2014 antara lain mencakup Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, yaitu sebagai berikut :

*Rencana Strategis*

## VISI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat

## MISI

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya
- Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

## TUJUAN

- Menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, dan sederhana.
- Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.
- Menata dan memperkuat organisasi Mahkamah Konstitusi yang independen, efektif, dan efisien.

## SASARAN

- Meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional, dan terpercaya;
- Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan;
- Terwujudnya sistem pradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas;
- Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan;
- Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional

## STRATEGI

- Peningkatan kualitas pelayanan persidangan untuk lima tahun ke depan secara terintegrasi
- Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, legeslatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden
- Membangun sarana pendukung modern yang bermanfaat bagi terselenggaranya administrasi dan manajemen persidangan yang baik dan efektif
- Peningkatan sarana dan prasarana kerja pegawai yang direalisasikan melalui kegiatan pembangunan rumah jabatan negara bagi Hakim Konstitusi yang lebih representatif dan pengembangan sarana dan prasarana *Information, Communication dan Technology* (ICT)
- Pengoptimalan penggunaan peralatan teknologi yang mendukung kinerja pegawai melalui kegiatan penyempurnaan dan diklat penggunaan sistem

- informasi administrasi umum;
- Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan barang milik Negara melalui pemeliharaan dan pengelolaan gedung serta penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan simulasi keadaan darurat;
  - Peningkatan peran dan fungsi Pusat Informasi Hukum (PIH);
  - Penyebarluasan hukum acara Mahkamah Konstitusi
  - Peningkatan kualitas pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
  - Meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
  - Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan
  - Memperkuat kajian perkara melalui kegiatan pengkajian, studi dan penelitian terkait dengan perkara, putusan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
  - Memperbanyak dan melengkapi referensi pustaka hukum dan konstitusi;
  - Memperluas jaringan penyebaran informasi tentang konstitusi dan ketatanegaraan;
  - Memperkuat fungsi jurnal konstitusi sebagai media peningkatan kesadaran berkonstitusi;
  - Meningkatkan fungsi kehumasan;
  - Mengoptimalkan penggunaan dan penerapan teknologi persidangan;

### KEBIJAKAN

- Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan diri sebagai pengawal konstitusi
- Merumuskan dan mengembangkan sistem beracara sesuai dengan prinsip peradilan yang baik dan profesional, serta sistem peradilan yang modern, cepat dan sederhana.
- Menyusun dan mengembangkan struktur kelembagaan yang mencerminkan prinsip-prinsip kemandirian, keefektifan, dan efisiensi
- Mahkamah Konstitusi harus memiliki SDM yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi
- Melengkapi berbagai kebutuhan akan sarana dan prasarana kelembagaan yang lebih memadai
- Mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan kelembagaan secara transparan dan akuntabel
- Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat
- Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi perlu melibatkan dan membangun komunikasi dengan berbagai *stake holder*

### CAPAIAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada tahun 2011, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang ada. Capaian kinerja dari sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

*Capaian Kinerja*

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Yustisial yang Modern, Profesional dan Terpercaya

Untuk sasaran ini telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdiri dari :

- a. Prosentase realisasi penanganan perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus adalah sebesar 64,47%, dengan perhitungan jumlah perkara PUU/SKLN yang diputus dalam tahun 2011 sebanyak 98 perkara dan jumlah perkara PUU/SKLN yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 152 perkara. Jika dibandingkan dengan target Prosentase realisasi penanganan perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus sebesar 70%, maka persentase capaiannya adalah sebesar 92,10%.
  - b. Prosentase realisasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Pemilukada) yang diputus adalah sebesar 94,93%, dengan perhitungan jumlah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Pemilukada) yang diputus dalam tahun 2011 sebanyak 131 perkara dari 138 perkara PHPU Pemilukada yang ditangani di tahun 2011. Dengan target Prosentase realisasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Pemilukada) yang diputus sebesar 90%, maka capaian kinerjanya sebesar 105,47%.
  - c. Indeks Pengukuran Pelayanan Perkara terealisasi sebesar SKOR 78,74, dengan target SKOR 80, maka capai kinerjanya sebesar 98,43%. Pengukuran Indeks Pelayanan Perkara dilakukan berdasarkan hasil penelitian/ survei pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi dilihat dari proses pelayanan konsultasi, permohonan dan registrasi perkara, pelayanan persidangan, dan pelayanan risalah dan hasil putusan sudah cukup baik.
2. Terwujudnya Sistem Peradilan yang Mandiri dan Berkualitas
- Indikator kinerja yang diukur pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
- a. Prosentase kajian atas perkara yang diregistrasi pada tahun 2011 sebesar 100% karena kajian dilakukan pada seluruh perkara yang diregistrasi. Adapun target prosentase kajian atas perkara yang diregistrasi sebesar 80%, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 125%.
  - b. Indeks Aksesibilitas pada tahun 2011 mempunyai SKOR 75,52, dengan target skor indek ini sebesar SKOR 70, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 107,88%. Indeks Aksesibilitas ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian/ survei yang dilakukan oleh MK RI pada tahun 2011, dan dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas di Mahkamah Konstitusi sudah baik, dilihat dari 7 aspek yaitu akses fisik, akses sistem informasi layanan peradilan, akses informasi tentang MKRI, akses pusat informasi di daerah, akses dunia maya, akses bantuan khusus, dan akses lainnya.
3. Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.
- a. Indeks Persepsi Media tahun 2011 mempunyai skor sebesar 74,34, dengan target indeks indikator ini sebesar SKOR 80, maka capain kinerjaa indikator ini mencapai sebesar 92,92%. Indeks Persepsi Media ini

- diperoleh dari berdasarkan hasil penelitian/ survei yang dilakukan oleh MK tentang persepsi media terhadap Mahkamah Konstitusi dilihat dari aspek Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kompetensi, Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi bagi Media Masa sudah cukup baik.
- b. Indikator kinerja yang diukur pada sasaran strategis ini adalah penyebaran informasi penanganan perkara dan putusan MK. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 113%, karena dari target 114 paket, telah terealisasi seluruhnya sebanyak 129 paket. Penyebaran informasi penanganan perkara dan putusan MK mencakup :
    - 1) Pemuatan putusan-putusan MK di media cetak
    - 2) Rubrik MK di media cetak
    - 3) Iklan Layanan Masyarakat
    - 4) Obrolan Konstitusi melalui Radio
    - 5) Obrolan Konstitusi Forum Negara Pancasila
    - 6) Publikasi MK/ Obrolan Konstitusi melalui TV Lokal
    - 7) Publikasi MK melalui TV nasional
  - c. Tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK pada temu wicara untuk tahun 2011 mempunyai SKOR 70,04. Target indikator ini sebesar SKOR 70, sehingga capaian kinerja ini 100,05%. Tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK diukur berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh oleh peserta temu wicara setelah mengikuti acara temu wicara.
4. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya
- a. Indeks Pelayanan Administrasi Umum tahun 2011 sebesar SKOR 70,28, dengan target skor indikator ini sebesar SKOR 70, maka capaian kinerja indeks pelayanan Administrasi Umum tahun 2011 jika dibandingkan dengan targetnya mencapai sebesar 100,4%. Indeks Pelayanan Administrasi Umum bertujuan untuk menganalisis persepsi pegawai MKRI atas pelayanan administrasi umum, lingkungan kerja, kepuasan kerja, produktivitas kerja dan keseimbangan kerja, serta keterkaitan diantaranya. Nilai indeks ini diperoleh berdasarkan penelitian/ survei terhadap kualitas pelayanan administrasi umum dengan responden semua pegawai MK RI. Berdasarkan hasil penelitian / survei dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan administrasi umum pada Bagian Kepegawaian, Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, dan Poliklinik di MK sudah cukup baik.
  - b. Prosentase Penyelesaian Pengembangan Gedung dan Asrama Diklat. Realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar 24,75%, dengan target 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 24,75%. Masih kecilnya pencapaian penyelesaian pengembangan gedung dan asrama diklat disebabkan adanya proses clearance terhadap rencana pembelian tanah dan pembangunan gedung dan asrama Diklat MK RI dan selain itu juga proses pembangunan ini tertunda karena rencana awal pembangunan di daerah Bekasi tidak dapat terealisasi karena terhambat oleh sulitnya proses pembebasan tanah.

Tahap yang telah dilakukan dalam tahun 2011 adalah pembelian tanah di daerah Cisarua Puncak Bogor. Proses pembangunan fisik baru akan direalisasikan pada tahun 2012.

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan ini mencakup tiga indikator yaitu predikat opini laporan keuangan, predikat tingkat capaian kinerja (LAKIP 2010), dan prosentase pelaksanaan evaluasi SAKIP.
  - a. Predikat opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK kepada MK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya MK telah mampu mempertahankan diri sebagai lembaga peradilan yang bersih dan berkualitas.
  - b. Predikat tingkat capaian kinerja untuk LAKIP 2010 sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sehingga target capaian MK untuk indikator tersebut masih nihil.
  - c. Prosentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) pada tahun 2011 telah mencapai target, yaitu sebesar 40%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%. Indikator ini dihitung berdasarkan rencana pelaksanaan Evaluasi SAKIP yang dilakukan terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI sebanyak 5 unit, dan dalam tahun 2011 ditargetkan 2 unit yang dapat dievaluasi (40%), dan pelaksanaan evaluasi SAKIP dalam tahun 2012 telah dilakukan terhadap 2 unit kerja, sehingga targetnya tercapai 100%.
  
6. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
  - a. Realisasi Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Reformasi Birokrasi tahun 2011 sebesar 100% karena dari 6 dokumen Reformasi Birokrasi dapat terealisasi seluruhnya. Dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 80%, capaian indikator kinerja prosentase tersusunnya dokumen administrasi reformasi birokrasi adalah sebesar 125%.

Realisasi dokumen reformasi birokrasi yang telah disusun dalam tahun 2011 terdiri dari:

    - 1) Dokumen Analisa Jabatan
    - 2) Dokumen Evaluasi Jabatan dan Peringkat Jabatan
    - 3) Dokumen Pemetaan Jabatan
    - 4) Dokumen Manajemen Kinerja dan Manajemen remunerasi
    - 5) Dokumen Pola Karir
    - 6) Dokumen Analisa Beban Kerja

Sedangkan 1 dokumen tambahan yaitu Dokumen Restrukturisasi Organisasi masih dalam proses, dokumen ini untuk memberikan masukan bagi draft rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Peraturan Sekjen.
  - b. Prosentase capaian pembentukan 9 Jabatan Fungsional tertentu sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar 50% karena dari target 100%, realisasi baru tercapai 50%, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2011 pembentukan 9 Jabatan Fungsional baru sampai dalam tahap

pembahasan dan perumusan pembentukannya, sehingga untuk tahap berikutnya yang merupakan pengusulan dan penetapan baru dilaksanakan pada tahun 2012, mengingat perlu dilakukan seleksi untuk mengusulkan Pejabat Fungsional tertentu. Adapun 9 Jabatan fungsional yang ditargetkan adalah sebagai berikut :

- 1) Arsiparis
  - 2) Analis Kepegawaian
  - 3) Auditor
  - 4) Penerjemah
  - 5) Pranata Komputer
  - 6) Paranata Humas
  - 7) Peneliti
  - 8) Perencana
  - 9) Pustakawan
- c. Prosentase penyampaian LHKPN bagi pejabat yang ditentukan yang terealisasi dalam tahun 2011 sebesar 97,78% atau 88 orang telah menyampaikan LHKPN dari 90 orang yang diwajibkan oleh SK Sekjen No. 016/KEP/SET.MK/2011 yang harus menyampaikan LHKPN. Jika dibandingkan dengan target prosentase penyampaian LHKPN bagi pejabat yang ditentukan sebesar 90%, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 108,64%.

#### 7. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional

Sasaran strategis ini mencakup dua indikator kinerja yaitu terlaksananya Simposium MK Internasional dan prosentase pelaksanaan kerjasama yang sesuai dengan MoU.

- a. Realisasi tahun 2011 untuk indikator kinerja terlaksananya Simposium MK Internasional sudah 100% karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10-14 Juli 2011.
- b. Realisasi prosentase pelaksanaan kerjasama yang sesuai dengan MoU pada tahun 2011 sebesar 100%, sesuai dengan target yang direncanakan semula. Dalam tahun 2011 telah dibuat 93 MOU, dan MOU tersebut telah dilaksanakan semua. Adapun rincian MOU tersebut adalah sbb :
  - 1) Perjanjian Kerja Sama dengan PKK 74 naskah
  - 2) Perjanjian Kerja sama dengan Mitra Kerja Temu Wicara 18 Naskah
  - 3) Nota Kesepahaman MK dengan PP Muhammadiyah 1 Naskah

## PENDAPATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp793.329.239,- atau 138,79% dari estimasinya sebesar Rp571.617.000,-.

*Pendapatan  
Rp793.329.239*

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011 seluruhnya diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang terdiri dari :

▪ Pendapatan Sewa Rumah Dinas / Rumah Negeri	Rp. 48.396.766
▪ Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	Rp. 329.882.282
▪ Pend. Denda Keterlambatan Peny. Pek. Pemerintah	Rp. 152.849.044
▪ Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	Rp. 893.220
▪ Pend. Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg Diderita Negara	Rp. 64.510.192
▪ Pendapatan Anggaran Lain – lain	Rp. 196.797.735
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 793.329.239</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp793.329.239,- mengalami kenaikan sebesar Rp152.786.977,- atau 23,85% dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2010 yang terealisasi sebesar Rp640.542.262,-.

**Tabel 1 :**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

No.	Uraian Penerimaan	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)
1.	Pendapatan Sewa Rumah Dinas / Rumah Negeri	48.396.766	49.869.648
2.	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	329.882.282	345.751.256
3.	Pend. Denda Keterlmbtn Peny. Pek. Pemerintah	152.849.044	71.783.501
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	893.220	862
5.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	0	14.600.000
6.	Pend. Pelns Ganti Rugi ats Kerug yg Diderita Negara	64.510.192	55.735.259
7.	Pendapatan Anggaran Lain - lain	196.797.735	102.801.736
	<b>Jumlah</b>	<b>793.329.239</b>	<b>640.542.262</b>

Kenaikan Pendapatan Negara bukan pajak selama Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 disebabkan adanya Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas pekerjaan TA 2010 yang terdiri dari :

- Pekerjaan pengadaan konfigurasi dan instalasi pengembangan ICT Multimedia MKRI sebesar Rp94.261.002,-
- Pekerjaan pengadaan konfigurasi dan instalasi pengembangan ICT pusat data sebesar Rp58.588.042,-

Serta Pendapatan Anggaran Lain - lain atas kelebihan pembayaran pekerjaan pengelolaan gedung MK dan rumah dinas TA 2010 sebesar Rp196.797.735.

**BELANJA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Realisasi Belanja Mahkamah Konstitusi selama periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp237.171.272.844,- atau 82,35% dari anggaran dalam DIPA yaitu sebesar Rp287.996.206.000,-. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

*Belanja  
Rp237.171.272.844*

**Tabel 2 :**  
**Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011**

No.	Klasifikasi Belanja	Jumlah ( Rp )
1.	Belanja Pegawai	10.807.804.808
2.	Belanja Barang	198.761.957.421
3.	Belanja Modal	27.601.510.615
	<b>Jumlah</b>	<b>237.171.272.844</b>

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp67.490.054.424,- atau 39,77% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2010 yang berjumlah Rp169.681.218.420,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3 :**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Per Klasifikasi Belanja  
Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

Klasifikasi Belanja	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Pegawai	10.807.804.808	9.533.364.904	1.274.439.904
Belanja Barang	198.761.957.421	147.412.186.944	51.349.770.477
Belanja Modal	27.601.510.615	12.735.666.572	14.865.844.043
<b>Jumlah</b>	<b>237.171.272.844</b>	<b>169.681.218.420</b>	<b>67.490.054.424</b>

Kenaikan realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, terkait dengan adanya penambahan pegawai dan meningkatnya volume kegiatan di Mahkamah Konstitusi serta adanya pengadaan tanah untuk pengembangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Selatan.

Realisasi Belanja sebesar Rp237.171.272.844,- tersebut digunakan untuk membiayai empat program sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2011, yaitu :

**Tabel 4 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program  
Tahun Anggaran 2011**

Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	115.600.000.000	109.477.985.107	94,70
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	70.296.206.000	25.930.942.188	36,89
3. Penanganan Perkara Konstitusi	55.000.000.000	54.927.384.397	99,87
4. Kesadaran Berkonstitusi	47.100.000.000	46.834.961.152	99,44
<b>Jumlah</b>	<b>287.996.206.000</b>	<b>237.171.272.844</b>	<b>82,35</b>

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK - BMN).

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

Laporan Realisasi Pendapatan disusun berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Konstitusi ke Rekening Kas Negara.

Laporan Realisasi Belanja disusun berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 telah kami rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

#### **2. Neraca**

Neraca disusun berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **3. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data aset yang disajikan dalam laporan keuangan ini berasal dari SIMAK-BMN. Mahkamah Konstitusi sudah melaksanakan SIMAK-BMN secara penuh.

#### A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi adalah :

##### (1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

*Pendapatan*

##### (2) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

*Belanja*

##### (3) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

*Aset*

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

*Aset Lancar*

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Piutang (*Netto*) disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan menerapkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

#### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan.

*Aset Tetap*

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu :

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

*Aset Lainnya*

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar Nilai tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer; lisensi, dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset lain – lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, tagihan TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset lain-lain.

#### **(4) KEWAJIBAN**

*Kewajiban*

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **(5) EKUITAS DANA**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara *Ekuitas Dana*

aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp793.329.239,- atau 138,79% dari estimasi pendapatan sebesar Rp571.617.000,-. Seluruh Pendapatan Negara tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp237.171.272.844,- atau 82,35% dari anggaran yang diterima sebesar Rp287.996.206.000,-. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 seluruhnya merupakan Belanja Rupiah Murni.

**Tabel 5 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara serta Belanja Tahun Anggaran 2011**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1.	<b>Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>Rp 571.617.000</b>	<b>Rp 793.329.239</b>	<b>138,79</b>
	▪ Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 571.617.000	Rp 793.329.239	138,79
2.	<b>Realisasi Belanja Negara</b>	<b>Rp 287.996.206.000</b>	<b>Rp 237.171.272.844</b>	<b>82,35</b>
	▪ Belanja Rupiah Murni	Rp 287.996.206.000	Rp 237.171.272.844	82,35

### **B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

#### **B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp793.329.239,- yang seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Pendapatan  
Negara dan Hibah*

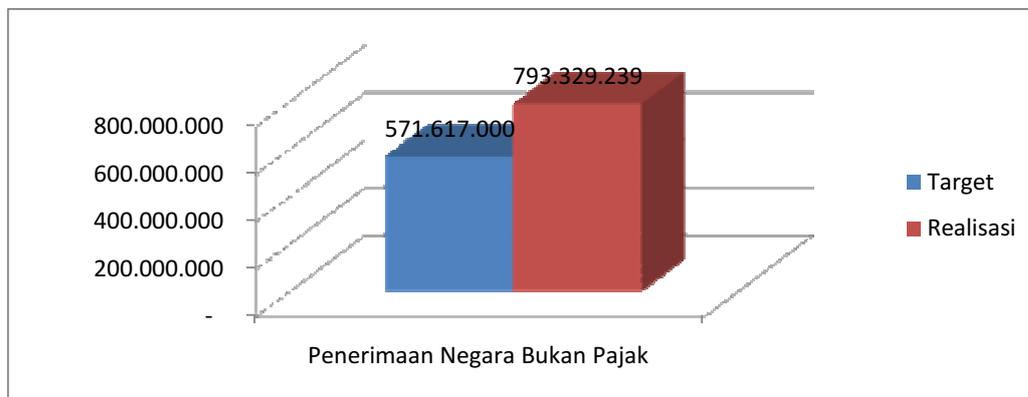
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 sebesar Rp793.329.239,- atau 138,79% dari estimasinya sebesar Rp571.617.000,-.

**Tabel 6 :**  
**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011**

No	Uraian	Target	Realisasi	% Real. Target
1.	<b>Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>Rp 571.617.000</b>	<b>Rp 793.329.239</b>	<b>138,79</b>
	▪ Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 571.617.000	Rp 793.329.239	138,79

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 1 :**  
**Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan TA 2011 (dlm Rp)**



### **B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Konstitusi TA 2011 sebesar Rp793.329.239,- atau 138,79% dari target penerimaan negara bukan pajak.

*Penerimaan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp793.329.239*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 sebesar Rp793.329.239,- mengalami kenaikan sebesar Rp152.786.977,- atau 23,85% dibandingkan dengan penerimaan TA 2010 yang terealisasi sebesar Rp640.542.262,-.

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan perbandingannya dengan TA 2010 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7 :**  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

No.	Uraian Penerimaan	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
1.	Pendapatan Sewa Rumah Dinas / Rumah Negeri	48.396.766	49.869.648	(1.472.882)	(2,95)
2.	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	329.882.282	345.751.256	(15.868.974)	(4,59)
3.	Pend. Denda Keterlmbtn Peny. Pek. Pemerintah	152.849.044	71.783.501	81.065.543	112,93
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	893.220	862	892.358	103521,81
5.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	0	14.600.000	(14.600.000)	(100,00)
6.	Pend. Pelns Ganti Rugi ats Kerug yg Diderita Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	64.510.192	55.735.259	8.774.933	15,74
7.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	196.797.735	102.801.736	93.995.999	91,43
	<b>Jumlah</b>	<b>793.329.239</b>	<b>640.542.262</b>	<b>152.786.977</b>	<b>23,85</b>

Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak selama Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 disebabkan adanya pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah atas pekerjaan TA

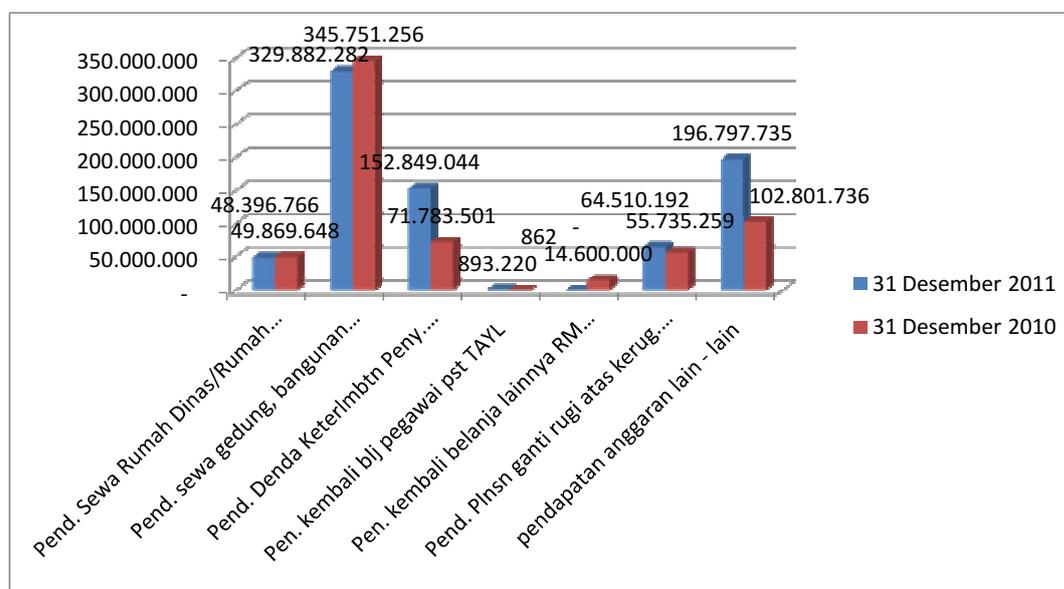
2010 yang terdiri dari :

- Pekerjaan pengadaan konfigurasi dan instalasi pengembangan ICT Multimedia MKRI sebesar Rp94.261.002,-
- Pekerjaan pengadaan konfigurasi dan instalasi pengembangan ICT pusat data sebesar Rp58.588.042,-

Serta pendapatan anggaran lain - lain atas kelebihan pembayaran pekerjaan pengelolaan gedung MK dan rumah dinas TA 2010 sebesar Rp196.797.735.

Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

**Grafik 2 :**  
**Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010 (dlm Rp)**



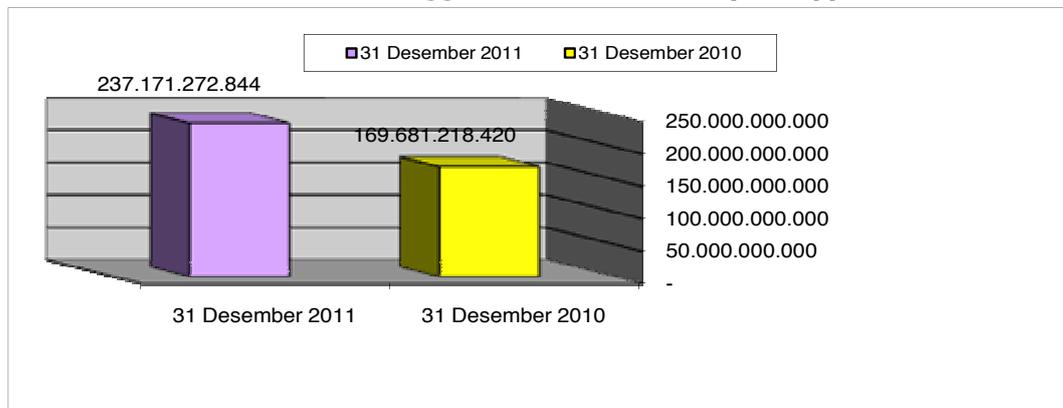
### **B.2.2. Belanja Negara**

Realisasi Belanja Negara selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp237.171.272.844,- atau 82,35% dari anggaran dalam DIPA yaitu sebesar Rp287.996.206.000,-. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

*Belanja Negara  
Rp237.171.272.844*

Realisasi belanja Negara Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp67.490.054.424,- atau 39,77% dibandingkan dengan realisasi belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang berjumlah Rp169.681.218.420,-. Perbandingan realisasi belanja tersebut dapat disajikan seperti grafik dibawah ini :

**Grafik 3 :**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Negara**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010 (dlm Rp)**



### **B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat**

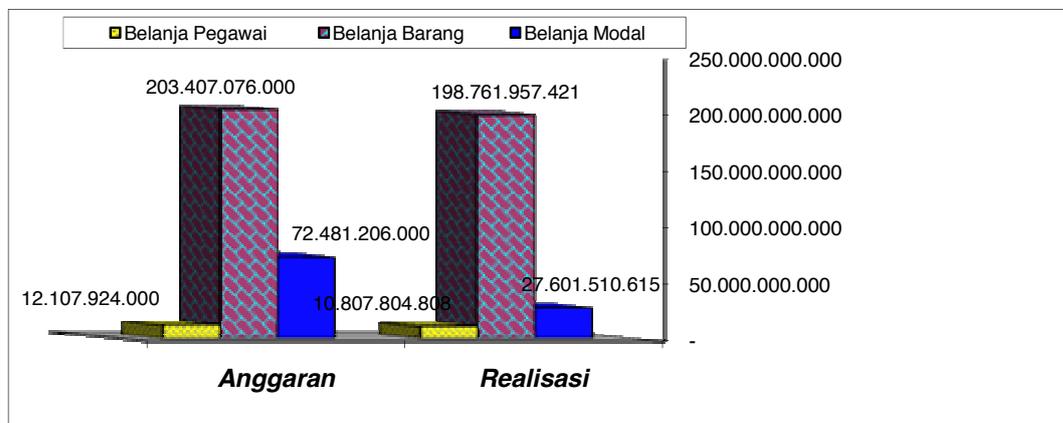
Realisasi Belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp237.171.272.844,- atau 82,35% dari anggaran dalam DIPA yaitu sebesar Rp287.996.206.000,-.

**Tabel 8 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2011**

Klasifikasi Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	12.107.924.000	10.807.804.808	89,26
Belanja Barang	203.407.076.000	198.761.957.421	97,72
Belanja Modal	72.481.206.000	27.601.510.615	38,08
<b>Jumlah</b>	<b>287.996.206.000</b>	<b>237.171.272.844</b>	<b>82,35</b>

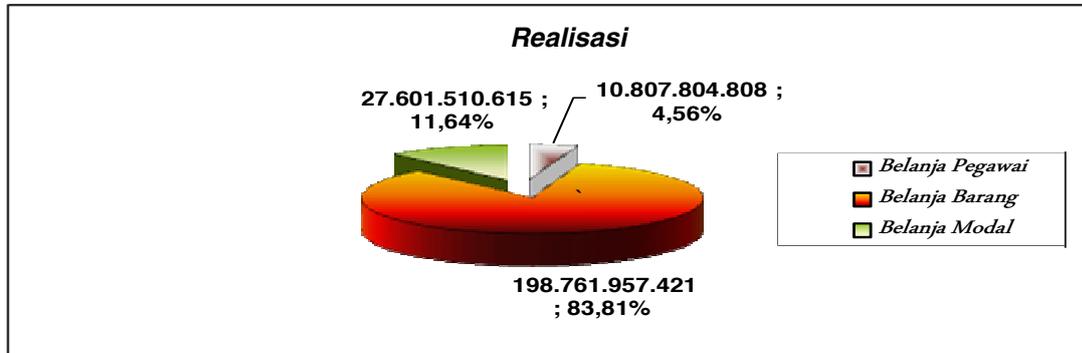
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

**Grafik 4 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2011 (dlm Rp)**



Komposisi realisasi belanja TA 2011 menurut jenis belanja dapat disajikan seperti diagram di bawah ini :

**Grafik 5 :**  
**Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2011 (dlm Rp)**



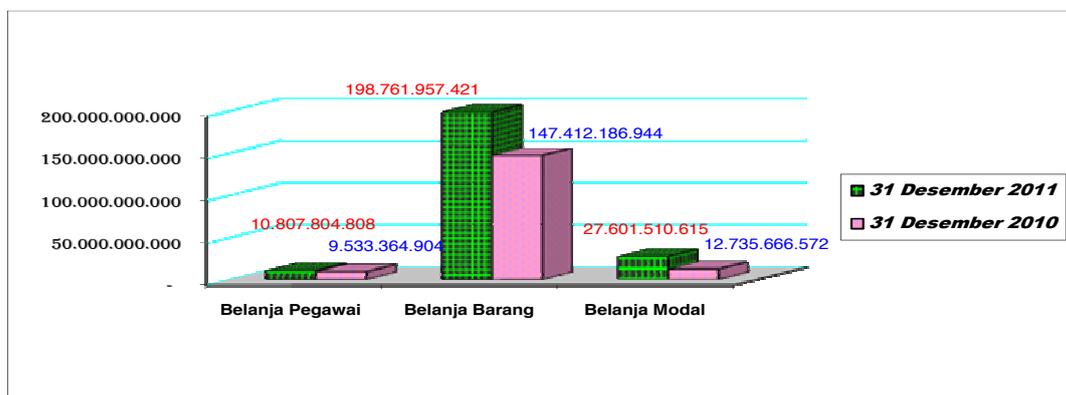
**Tabel 9 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

Klasifikasi Belanja	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Belanja Pegawai	10.807.804.808	9.533.364.904	1.274.439.904	13,37
Belanja Barang	198.761.957.421	147.412.186.944	51.349.770.477	34,83
Belanja Modal	27.601.510.615	12.735.666.572	14.865.844.043	116,73
<b>Jumlah</b>	<b>237.171.272.844</b>	<b>169.681.218.420</b>	<b>67.490.054.424</b>	<b>39,77</b>

Dari tabel di atas terlihat adanya kenaikan realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 dibandingkan Tahun Anggaran 2010 disebabkan oleh kenaikan dalam Belanja Pegawai, Barang dan Modal, yaitu adanya kenaikan gaji pokok PNS dan meningkatnya volume kegiatan di Mahkamah Konstitusi serta adanya pengadaan tanah untuk pengembangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Selatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2011 dan 2010, dapat dilihat pula dari diagram berikut :

**Grafik 6 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010 (dlm Rp)**



### B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp10.807.804.808,- atau 89,26% dari total pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp12.107.924.000,-.

*Belanja Pegawai  
Rp10.807.804.808*

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dan perbandingan dengan anggarannya adalah sebagai berikut:

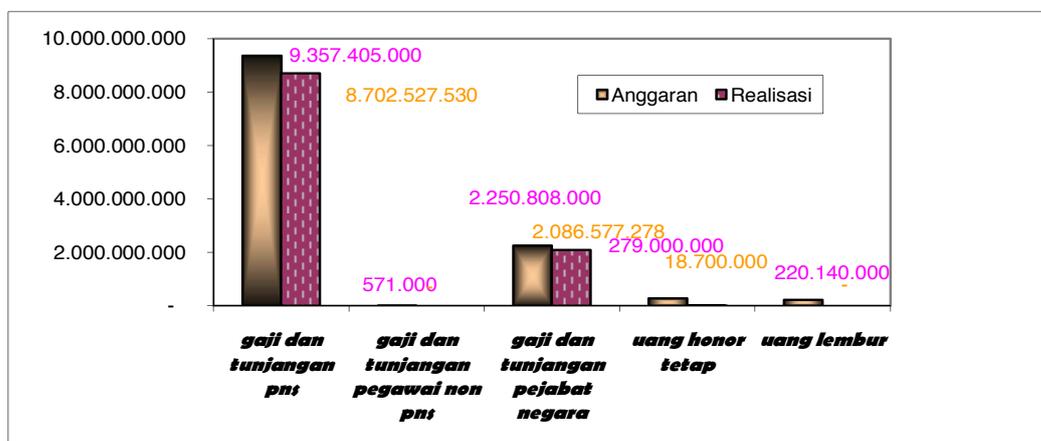
**Tabel 10 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2011**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan PNS	9.357.405.000	8.702.527.530	93,00
Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	2.250.808.000	2.086.577.278	92,70
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	571.000	0	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	279.000.000	18.700.000	6,70
Belanja Uang Lembur	220.140.000	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.107.924.000</b>	<b>10.807.804.808</b>	<b>89,26</b>

Realisasi Belanja Pegawai tidak 100% atau hanya sebesar 89,26% dikarenakan tidak adanya permintaan pembayaran uang lembur dan perubahan mekanisme pembayaran hak keuangan bagi Tenaga Perbantuan Non Instansi sebanyak 3 orang.

Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dapat digambarkan dalam grafik berikut :

**Grafik 7 :**  
**Perbandingan Anggaran & Realisasi Belanja Pegawai TA 2011**



Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp10.807.804.808,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.274.439.904,- atau 13,37% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp9.533.364.904,-. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai Mahkamah Konstitusi dan adanya kenaikan gaji pokok untuk pegawai negeri sipil selama Tahun Anggaran 2011.

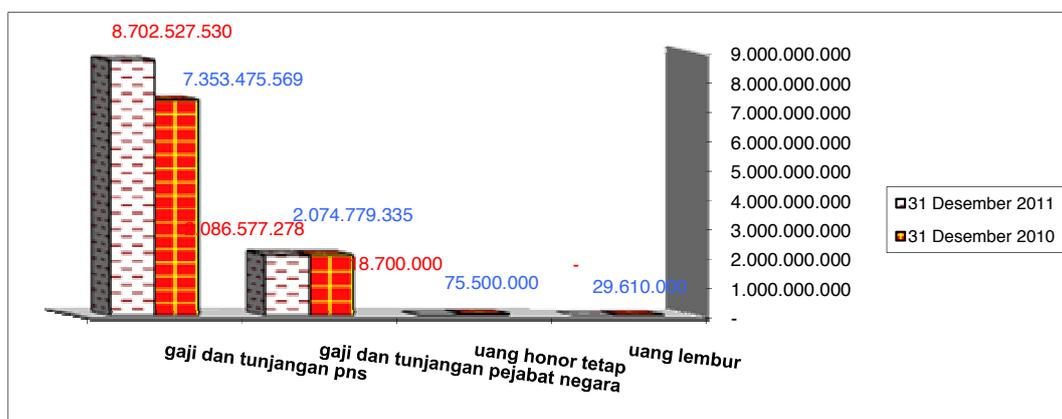
Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dengan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

**Tabel 11 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Pegawai**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

Klasifikasi Belanja	Realisasi TA 2011 (Rp)	Realisasi TA 2010 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan PNS	8.702.527.530	7.353.475.569	1.349.051.961	18,35
Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	2.086.577.278	2.074.779.335	11.797.943	0,57
Belanja Uang Honor Tetap	18.700.000	75.500.000	(56.800.000)	75,23
Belanja Uang Lembur	0	29.610.000	(29.610.000)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>10.807.804.808</b>	<b>9.533.364.904</b>	<b>1.274.439.904</b>	<b>13,37</b>

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2011 dan 2010 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

**Grafik 8 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Pegawai**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010**



### B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2011 adalah sebesar Rp198.761.957.421,- atau 97,72% dari pagu anggarannya sebesar Rp203.407.076.000,-

*Belanja Barang  
Rp198.761.957.421*

Rincian realisasi Belanja Barang TA 2011 dan perbandingan dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

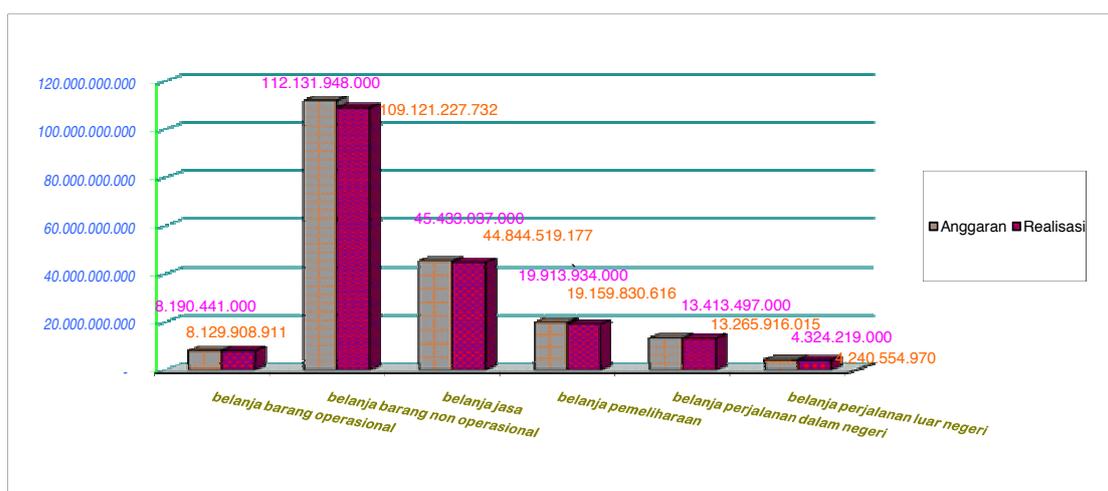
**Tabel 12 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**  
**Tahun Anggaran 2011**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	8.190.441.000	8.129.908.911	99,26
Belanja Barang Non Operasional	112.131.948.000	109.121.227.732	97,32
Belanja Jasa	45.433.037.000	44.844.519.177	98,70
Belanja Pemeliharaan	19.913.934.000	19.159.830.616	96,21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.413.497.000	13.265.916.015	98,90
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.324.219.000	4.240.554.970	98,07
<b>Jumlah</b>	<b>203.407.076.000</b>	<b>198.761.957.421</b>	<b>97,72</b>

Realisasi Belanja Barang TA 2011 sebesar Rp198.761.957.421,- mengalami peningkatan sebesar Rp51.349.770.477,- atau 34,83% dari realisasi Belanja Barang TA 2010 sebesar Rp147.412.186.944,- Hal ini disebabkan meningkatnya volume kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Realisasi Belanja Barang TA 2011 dan perbandingan dengan anggarannya dalam bentuk grafik, dapat dilihat sebagai berikut :

**Grafik 9 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**  
**Tahun Anggaran 2011 (dlm Rp)**



Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp180.717.400,- dikapitalisasi menjadi Aset Tetap kedalam akun Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan (lihat catatan C.2.6.2, C.2.6.3 dan lampiran).

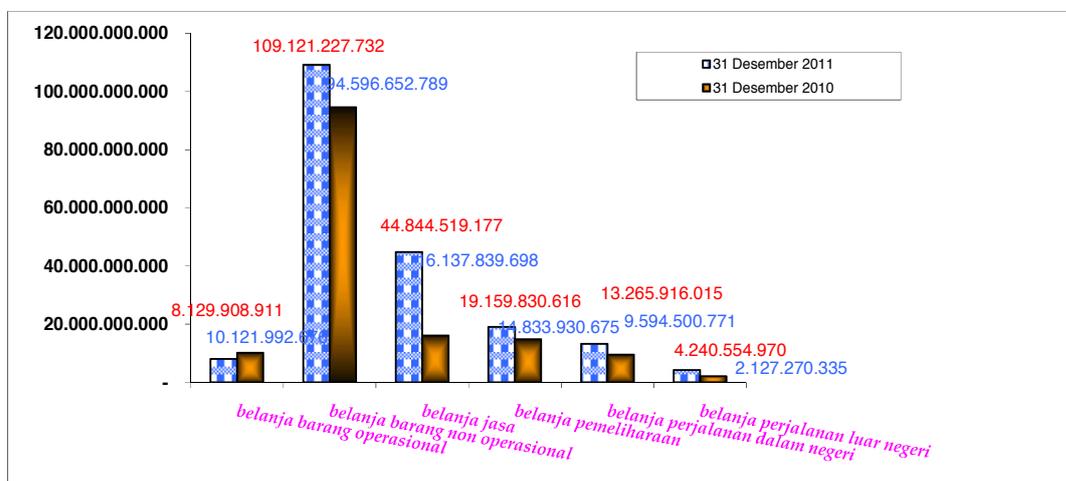
Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut :

**Tabel 13 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Barang**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

Uraian	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	8.129.908.911	10.121.992.676	(19,68)
Belanja Barang Non Operasional	109.121.227.732	94.596.652.789	15,35
Belanja Jasa	44.844.519.177	16.137.839.698	177,88
Belanja Pemeliharaan	19.159.830.616	14.833.930.675	29,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.265.916.015	9.594.500.771	38,27
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.240.554.970	2.127.270.335	99,34
<b>Jumlah</b>	<b>198.761.957.421</b>	<b>147.412.186.944</b>	<b>34,83</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2011 dan 2010 dalam bentuk grafik, adalah sebagai berikut :

**Grafik 10 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Barang**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010 (dlm Rp)**



### B.2.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2011 adalah sebesar Rp27.601.510.615,- atau 38,08% dari pagu anggarannya sebesar Rp72.481.206.000,-.

*Belanja Modal  
Rp27.601.510.615*

Rincian realisasi Belanja Modal TA 2011 dan perbandingan dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

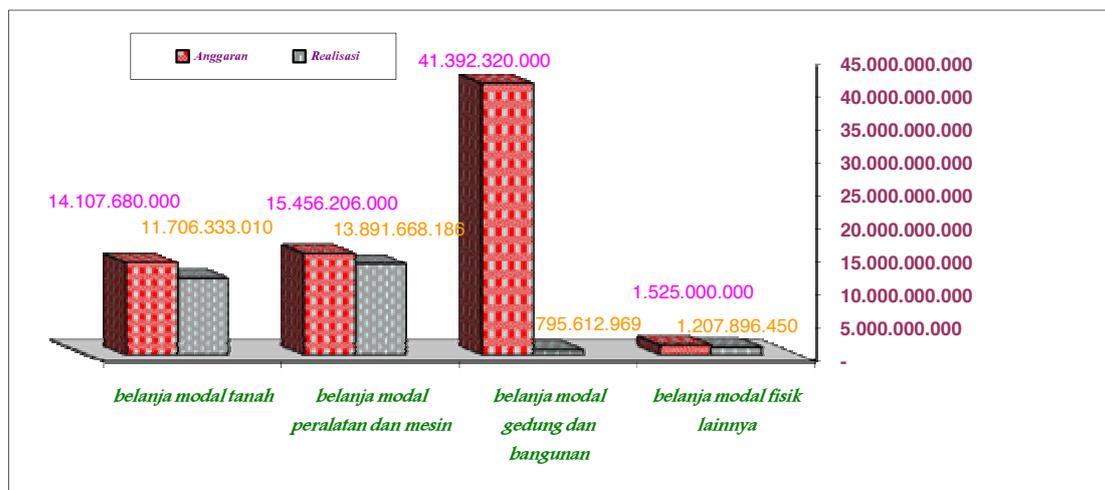
**Tabel 14 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2011**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	14.107.680.000	11.706.333.010	82,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.456.206.000	13.891.668.186	89,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.392.320.000	795.612.969	1,92
Belanja Modal Fisik Lainnya	1.525.000.000	1.207.896.450	79,21
<b>Jumlah</b>	<b>72.481.206.000</b>	<b>27.601.510.615</b>	<b>38,08</b>

Rendahnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan adanya relokasi pembangunan akibat masalah administrasi tanah yang semula akan dibangun.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dan perbandingan dengan anggarannya dalam bentuk grafik, adalah sebagai berikut :

**Grafik 11 :**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran 2011 (dln Rp)**



Realisasi Belanja Modal TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp14.865.844.043,- bila dibandingkan dengan TA 2010 sebesar Rp12.735.666.572,-. Kenaikan realisasi Belanja Modal ini disebabkan oleh adanya realisasi belanja modal tanah untuk pengembangan pusdiklat di Jl. Raya Puncak, Desa Tugu. Selain itu adanya kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin diantaranya berupa pengembangan hydrant kawasan pusdiklat, pembangunan sistem aplikasi penelusuran aset, pengadaan mesin pencetak kertas otentik, pengadaan perlengkapan sarana kantor dan gedung, serta pengadaan meubelair.

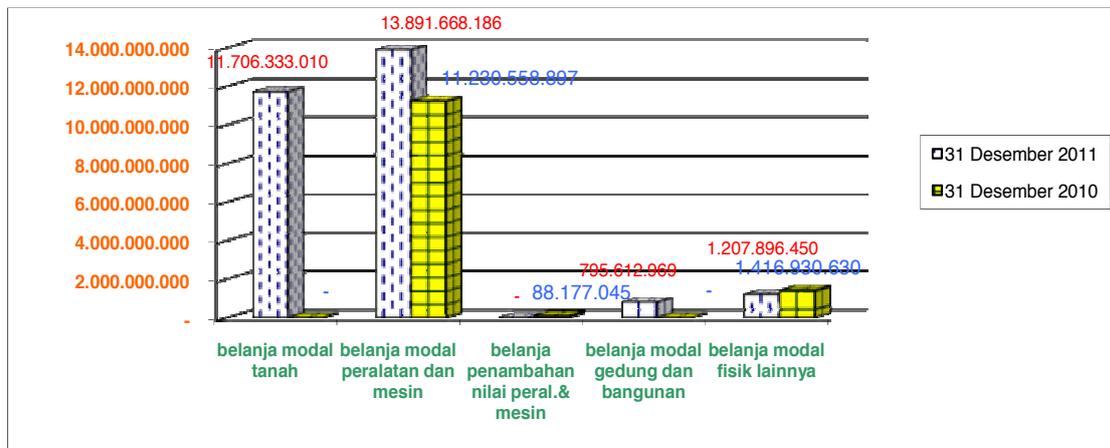
Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 15 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010**

Uraian	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Modal Tanah	11.706.333.010	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.891.668.186	11.230.558.897	23,70
Bel. Penambahan Nilai Peral. & Mesin	0	88.177.045	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	795.612.969	0	0,00
Belanja Modal Fisik Lainnya	1.207.896.450	1.416.930.630	(14,75)
<b>Jumlah</b>	<b>27.601.510.615</b>	<b>12.735.666.572</b>	<b>116,73</b>

Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2011 dan 2010, dapat dilihat pada diagram berikut :

**Grafik 12 :**  
**Perbandingan Realisasi Klasifikasi Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran 2011 dan 2010 (dlm Rp)**



### B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-442/MK.02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 (APBN-P), anggaran belanja Mahkamah Konstitusi mengalami kenaikan sebesar Rp296.206.000,- sehingga jumlah anggaran belanja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2011 yang semula sebesar Rp287.700.000.000 menjadi Rp287.996.206.000,-.
2. Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-5/MK.6/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi, perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dengan Koperasi Konstitusi Nomor 024/PK/2011, Addendum Nomor 191/PK/2012 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, sehingga biaya sewa naik dari Rp186.216.000,- per tahun menjadi Rp485.760.000,- per tahun. Kenaikan tersebut tidak mempengaruhi pendapatan pada LRA maupun neraca karena surat tentang persetujuan perpanjangan sewa tersebut terbit setelah tanggal neraca.

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2011 ditutup dengan nilai Aset sebesar Rp511.540.329.989,- Kewajiban sebesar Rp103.163.990,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp511.437.165.999,-.

Perbandingan Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16 :**  
**Perbandingan Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010**

Uraian	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Aset	511.540.329.989	485.460.894.224	26.079.435.765	5,37
Kewajiban	103.163.990	186.978.566	(83.814.576)	(44,83)
Ekuitas Dana	511.437.165.999	485.273.915.658	26.163.250.341	5,39
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>511.540.329.989</b>	<b>485.460.894.224</b>	<b>26.079.435.765</b>	<b>5,37</b>

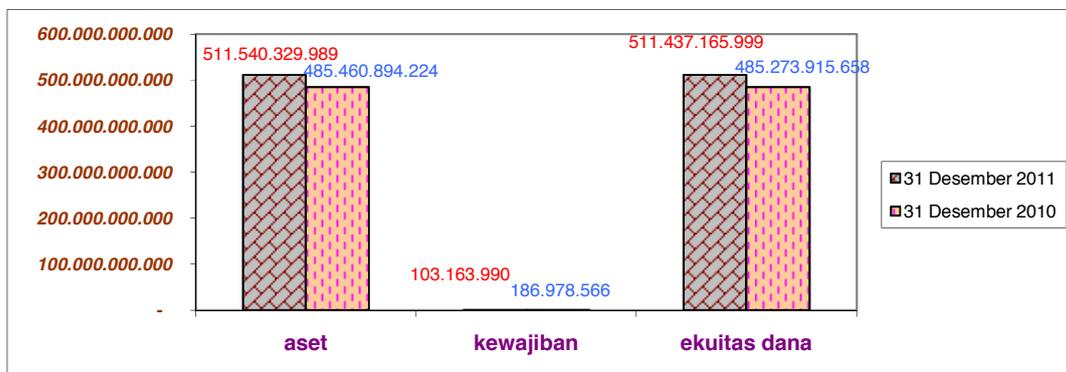
Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp511.540.329.989,- terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp1.509.971.933,- Aset Tetap sebesar Rp500.917.178.615,- dan Aset Lainnya sebesar Rp9.113.179.441,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp103.163.990,- seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp511.437.165.999,- terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.406.807.943,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp510.030.358.056,-.

Grafik Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 disajikan sebagai berikut :

**Grafik 13 :**  
**Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 (dln Rp)**



## C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

### ASET

#### Aset Lancar

##### C.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah Nihil,-.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per eselon I adalah sebagai berikut :

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Nihil*

**Tabel 17 :**  
**Nilai Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 2010**

Kode	Uraian Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BA 077	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening di Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.

### C.2.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp34.894.202,- dan Nihil,-.

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per eselon I adalah sebagai berikut:

*Piutang Bukan Pajak  
Rp34.894.202*

**Tabel 18 :**

**Perbandingan Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010**

Kode	Uraian Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BA 077	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	34.894.202	0	34.894.202
	<b>TOTAL</b>	<b>34.894.202</b>	<b>0</b>	<b>34.894.202</b>

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp34.894.202,- terdiri dari :

1. Kelebihan bayar atas tunjangan fungsional pegawai bulan Juli dan Agustus 2011 sebesar Rp1.430.000,- yang dibayarkan secara bertahap selama 8 bulan sejak bulan September 2011.
2. Sewa ruangan di lingkungan gedung Mahkamah Konstitusi oleh Koperasi Konstitusi berdasarkan surat perjanjian sewa Nomor 036.112/PK/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Perjanjian Sewa Menyewa antara Mahkamah Konstitusi dengan Koperasi Konstitusi yang belum dibayarkan per 31 Desember 2011 sebesar Rp34.008.306,-.

Nilai yang tercantum dalam neraca merupakan sisa piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp34.894.202 yang merupakan piutang dengan kualitas lancar.

Saldo Piutang Bukan Pajak ini merupakan saldo piutang sebelum penyisihan, sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

### C.2.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar (Rp174.471),- dan Nihil,- dengan rincian sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (Rp174.471)*

**Tabel 19 :**  
**Perbandingan Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010**

Kode	Uraian Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BA 077	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	(174.471)	0	174.471
	<b>TOTAL</b>	<b>(174.471)</b>	<b>0</b>	<b>174.471</b>

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak sebesar (Rp174.471),- merupakan hasil tarif penyisihan 5/1000 (permil) dikali dengan saldo piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp34.894.202,- yang merupakan piutang dengan kualitas lancar.

### C.2.4 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp34.719.731,- dan Nihil,-.

*Piutang Bukan Pajak (Netto) Rp34.719.731*

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 20 :**  
**Perbandingan Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2011 dan 2010**

Kode	Uraian Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BA 077	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	34.719.731	0	34.719.731
	<b>TOTAL</b>	<b>34.719.731</b>	<b>0</b>	<b>34.719.731</b>

Saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per 31 Desember 2011 merupakan hasil dari pengurangan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp34.894.202,- dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak sebesar Rp174.471,-.

### C.2.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.475.252.202,- dan Rp1.704.525.837,- dengan rincian sebagai berikut :

*Persediaan Rp1.475.252.202*

**Tabel 21 :**  
**Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	1.475.252.202	1.704.525.837	(229.273.635)
<b>TOTAL</b>	<b>1.475.252.202</b>	<b>1.704.525.837</b>	<b>(229.273.635)</b>

**Tabel 22 :**  
**Daftar Persediaan per 31 Desember 2011**

<b>No.</b>	<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
A.	Alat Tulis Kantor		
1.	115111	Barang Konsumsi	660.401.814
2.	115113	Bahan Utk Pemeliharaan	42.683.790
3.	115131	Bahan Baku	75.000
Sub Jumlah			703.160.604
B.	Bahan Cetakan		
1.	115128	Barang Persediaan lainnya utk dijual/diserahkan ke Masy.	445.379.830
Sub Jumlah			445.379.830
C.	Obat – Obatan		
1.	115199	Persediaan Lainnya	326.711.768
Sub Jumlah			326.711.768
<b>Jumlah</b>			<b>1.475.252.202</b>

Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

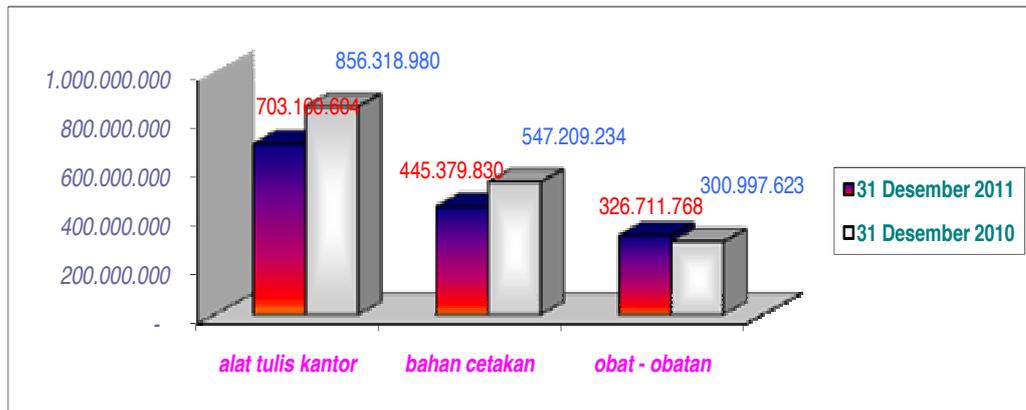
**Tabel 23 :**  
**Perbandingan Nilai Jenis Persediaan  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>No</b>	<b>Jenis Persediaan</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>
1.	Alat Tulis Kantor	703.160.604	856.318.980
2.	Bahan Cetakan	445.379.830	547.209.234
3.	Obat – Obatan	326.711.768	300.997.623
<b>Jumlah</b>		<b>1.475.252.202</b>	<b>1.704.525.837</b>

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik. Terdapat perbedaan angka antara hasil stock opname obat-obatan dengan saldo persediaan obat-obatan di neraca sebesar Rp2.780,13,- dikarenakan oleh pembulatan angka keatas secara otomatis pada SIMAK BMN.

Perbandingan Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 14 :**  
**Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010**  
**(dlm Rp)**



## Aset Tetap

### C.2.6 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing Rp500.917.178.615,- dan Rp477.125.286.670,-. Mutasi Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2011 dipengaruhi oleh Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke akun Aset Tak Berwujud - Software. Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Aset Tetap  
Rp500.917.178.615*

**Tabel 24 :**  
**Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010**

Jenis Aset Tetap	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	89.075.216.326	77.368.883.316	11.706.333.010	15,13
Peralatan dan Mesin	171.177.014.723	116.169.156.176	55.007.858.547	47,35
Gedung dan Bangunan	187.136.608.095	268.370.367.977	(81.233.759.882)	(30,27)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.031.009.925	1.771.272.060	37.259.737.865	2.103,56
Aset Tetap Lainnya	13.838.650.246	13.445.607.141	393.043.105	2,92
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	658.679.300	0	658.679.300	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.917.178.615</b>	<b>477.125.286.670</b>	<b>23.791.891.945</b>	<b>4,99</b>

Rincian dan perbandingan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010, disajikan pula dalam diagram sebagai berikut :

**Grafik 15 :**  
**Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010**



Posisi Aset Tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 25 :**  
**Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2011**

Jenis Aset Tetap	Aset Tetap dalam Neraca (Rp)	Aset Tetap dalam SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
Tanah	89.075.216.326	89.075.216.326	0
Peralatan dan Mesin	171.177.014.723	171.177.014.723	0
Gedung dan Bangunan	187.136.608.095	187.136.608.095	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.031.009.925	39.031.009.925	0
Aset Tetap Lainnya	13.838.650.246	13.838.650.246	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	658.679.300	658.679.300	0
<b>Jumlah</b>	<b>500.917.178.615</b>	<b>500.917.178.615</b>	<b>0</b>

### C.2.6.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp89.075.216.326,- dan Rp77.368.883.316,- dengan rincian sebagai berikut :

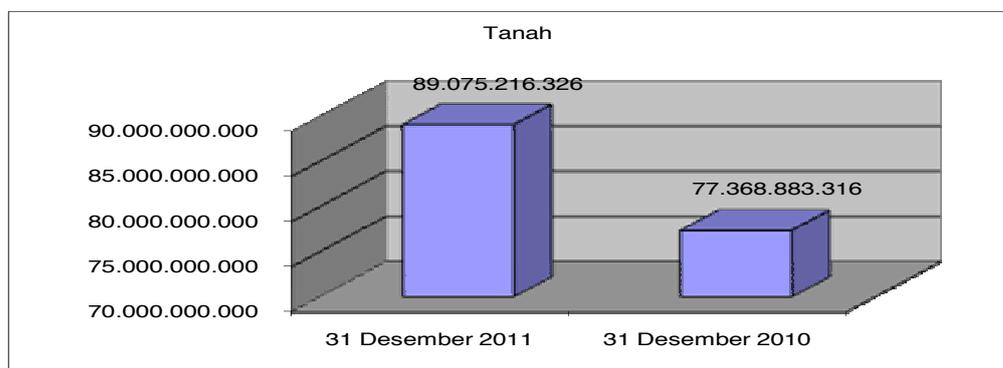
*Tanah  
Rp89.075.216.326*

**Tabel 26 :**  
**Perbandingan Nilai Tanah per 31 Desember 2011 dan 2010**

Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	89.075.216.326	77.368.883.316	11.706.333.010
<b>TOTAL</b>	<b>89.075.216.326</b>	<b>77.368.883.316</b>	<b>11.706.333.010</b>

Nilai Tanah per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat dilihat pada diagram berikut:

**Grafik 16 :**  
**Perbandingan Tanah per 31 Desember 2011 dan 2010**



Tanah Mahkamah Konstitusi RI terletak pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Bukti Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat (Gedung kantor)	4.220	Sertifikat Hak Pakai No.84 tanggal 20 Desember 2005	49.497.690.816	2005
Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat (Rumah Dinas)	35.000	Sertifikat Hak Pakai No.10 tanggal 25 Juli 2008	27.871.192.500	2007
Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua Bogor (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)	14.282	Proses balik sertifikat dari Sertifikat Hak Milik No.618 ke Sertifikat Hak Pakai atas nama Mahkamah Konstitusi	11.706.333.010	2011
Jumlah			89.075.216.326	

Mutasi/perubahan Tanah sebesar Rp11.706.333.010,- tersebut adalah sebagai berikut:

Penambahan :	
- Belanja Modal Tanah	Rp 11.592.077.010
- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	Rp 114.256.000
<b>Jumlah Mutasi/perubahan Tanah</b>	<b>Rp 11.706.333.010</b>

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp114.256.000 merupakan pembayaran penyedia jasa PPAT pengadaan tanah atas pengembangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang nantinya akta dari PPAT tersebut dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat.

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 27 :**  
**Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2011**

MAK	Uraian	Jumlah (Rp)
531111	Belanja Modal Tanah	11.592.077.010
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	114.256.000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>11.706.333.010</b>

### C.2.6.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp171.177.014.723,- dan Rp116.169.156.176,-. Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2011 sebagian besar disebabkan adanya penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, migrasi dari Aset Tetap Lainnya dan Reklasifikasi Belanja Modal ke akun Aset Tak Berwujud - Software. Perbandingan Posisi Nilai Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp171.177.014.723*

**Tabel 28 :**  
**Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	171.177.014.723	116.169.156.176	55.007.858.547
<b>TOTAL</b>	<b>171.177.014.723</b>	<b>116.169.156.176</b>	<b>55.007.858.547</b>

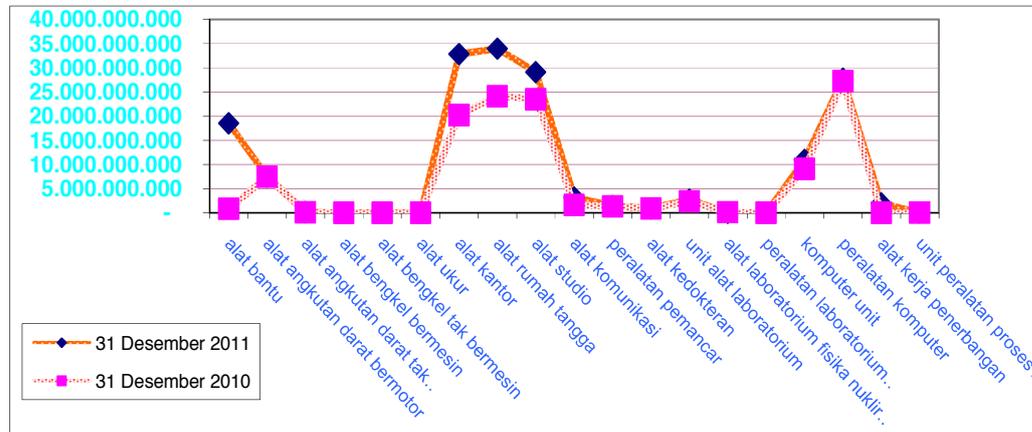
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 29 :**  
**Perbandingan Rincian Nilai Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

Jenis Peralatan dan Mesin	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Alat Bantu	18.520.477.278	842.818.766	17.677.658.512
Alat Angkutan Darat Bermotor	7.467.739.025	7.467.739.025	0
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	129.815.480	109.174.500	20.640.980
Alat Bengkel Bermesin	2.980.000	2.980.000	0
Alat Bengkel Tak Bermesin	14.872.000	15.972.000	(1.100.000)
Alat Ukur	7.385.227	7.722.227	(337.000)
Alat Kantor	32.812.755.635	20.238.662.135	12.574.093.500
Alat Rumah Tangga	33.950.623.845	24.134.792.037	9.815.831.808
Alat Studio	29.086.188.572	23.495.964.723	5.590.223.849
Alat Komunikasi	3.180.933.578	1.647.170.185	1.533.763.393
Peralatan Pemancar	1.362.954.334	1.356.399.334	6.555.000
Alat Kedokteran	902.572.676	901.009.184	1.563.492
Unit Alat Laboratorium	2.735.092.310	2.386.933.375	348.158.935
Alat Laboratorium Fisika Nuklir	4.510.000	145.830.900	(141.320.900)
Peralatan laboratorium hidrodinamica	11.133.515	0	11.133.515
Komputer Unit	10.929.121.733	9.118.479.450	1.810.642.283
Peralatan Komputer	27.748.718.170	27.252.295.427	496.422.743
Alat Kerja Penerbangan	1.944.009.095	0	1.944.009.095
Unit Peralatan Proses/Produksi	45.312.250	45.312.250	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>170.857.194.723</b>	<b>119.169.255.518</b>	<b>51.687.939.205</b>
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0	(3.000.099.342)	3.000.099.342
Migrasi dari Aset Tetap Lainnya	319.820.000	0	319.820.000
<b>Net-Peralatan dan Mesin</b>	<b>171.177.014.723</b>	<b>116.169.156.176</b>	<b>55.007.858.547</b>

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat dilihat pada diagram berikut :

**Grafik 17 :**  
**Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010**



Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.007.858.547,- tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Penambahan :</b>	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 13.891.668.186
- Migrasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp 319.820.000
- Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp 125.120.000
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 44.141.393.957
	<b>Rp 58.478.002.143</b>
<b>Pengurangan :</b>	
- Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan & Mesin Ke Aset Tak Berwujud	Rp 2.128.390.298
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain berupa barang rusak berat	Rp 628.108.000
- Koreksi Nilai Aset Peralatan	Rp 708.857.298
- Ekstrakomptabel	Rp 4.788.000
	<b>Rp 3.470.143.596</b>
<b>Jumlah Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp 55.007.858.547</b>

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp319.820.000,- merupakan migrasi dari Aset Tetap Lainnya.

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp125.120.000,- merupakan nilai kapitalisasi dari belanja barang antara lain Fujinon Pan/Tilt Camera-CPT-70F-02A dan power supply delegate.

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.141.393.957,- merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang terdiri dari : gandola, elevator/lift, stationary generating set, AC central/chiller, hydrant system, PABX, fire alarm, sound system gedung, audio & visual conference, CCTV dan pompa air.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 30 :**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011**

MAK	Uraian	Jumlah (Rp)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.891.668.186
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>13.891.668.186</b>

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja Modal tidak sama dengan pencatatan Peralatan dan Mesin yaitu :

Keterangan	Jumlah
<b>Penambahan Peralatan dan Mesin terkait BM Peralatan dan Mesin</b>	
Pembelian	Rp 13.891.668.186
Jumlah	Rp 13.891.668.186
<b>Penambahan Peralatan dan Mesin tidak terkait BM :</b>	
Migrasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp 319.820.000
Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp 125.120.000
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 44.141.393.957
Jumlah	Rp 44.586.333.957
<b>Total</b>	<b>Rp 58.478.002.143</b>

Pengurangan sebesar Rp2.128.390.298,- merupakan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud yang terdiri dari :

1. Sistem e-perisalah persidangan MKRI (e-perisalah) sebesar Rp491.940.130,-
2. Software Perangkat Pengembangan ICT (sistem aplikasi media monitoring) sebesar Rp981.284.304,-
3. Sistem Aplikasi Penelusuran Aset BMN sebesar Rp622.825.864,-
4. Software/Aplikasi Absensi sebesar Rp32.340.000,-

Pengurangan sebesar Rp628.108.000,- merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas barang rusak berat, yaitu alat laboratorium, yang akan dihapuskan.

Pengurangan sebesar Rp708.857.298,- merupakan mutasi Peralatan Penelusuran Aset ke Belanja Barang karena belanja tersebut merupakan belanja jasa pelabelan dan penelusuran aset BMN yang tidak menghasilkan barang inventaris.

Pengurangan sebesar Rp4.788.000,- merupakan belanja modal ekstrakomptabel yang terdiri dari alat rumah tangga dan alat studio.

### C.2.6.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp187.136.608.095,- dan Rp268.370.367.977,-.

Perbandingan Posisi Nilai Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

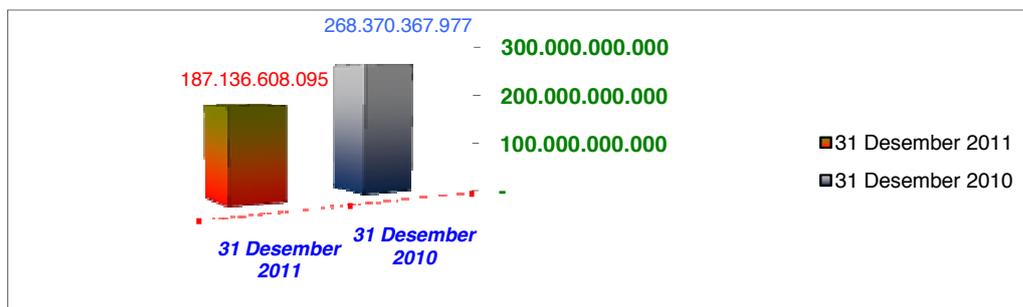
*Gedung dan Bangunan  
Rp187.136.608.095*

**Tabel 31 :**  
**Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	187.136.608.095	268.370.367.977	(81.233.759.882)
<b>TOTAL</b>	<b>187.136.608.095</b>	<b>268.370.367.977</b>	<b>(81.233.759.882)</b>

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 18 :**  
**Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**



Gedung dan bangunan Mahkamah Konstitusi terletak pada 2 (dua) lokasi, yaitu gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat yang digunakan sebagai gedung kantor Mahkamah Konstitusi dan gedung dan bangunan yang terletak di Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat yang digunakan sebagai rumah dinas dan Pusdiklat Mahkamah Konstitusi. (Rincian daftar Gedung dan Bangunan Mahkamah Konstitusi terdapat pada lampiran).

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp81.233.759.882),- tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Penambahan :</b>	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 658.679.300
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 136.933.669
- Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp 55.597.400
	<b>Rp 851.210.369</b>
<b>Pengurangan :</b>	
- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp 658.679.300
- Koreksi Nilai Aset Gedung dan Bangunan	Rp 25.159.129
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp 44.141.393.957
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 37.259.737.865
	<b>Rp 82.084.970.251</b>
<b>Jumlah Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp (81.233.759.882)</b>

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.597.400,-, merupakan nilai kapitalisasi dari belanja barang berupa pemasangan kanopi dan automatic turbin ventilator.

Pengurangan sebesar Rp658.679.300,- merupakan reklasifikasi ke KDP atas pekerjaan jasa konsultasi perencana sebesar Rp589.200.000,- serta jasa konsultasi manajemen konstruksi sebesar Rp69.479.300,- atas pengembangan gedung dan asrama Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang pembangunan fisiknya baru akan direalisasikan di Tahun 2012.

Pengurangan sebesar Rp25.159.129,- merupakan koreksi nilai atas pekerjaan rehabilitasi ruang penerimaan permohonan perkara konstitusi karena tidak bersifat menambah kapasitas gedung dan tidak memperpanjang masa manfaat gedung Mahkamah Konstitusi.

Pengurangan sebesar Rp44.141.393.957,- merupakan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin yang terdiri dari : gandola, elevator/lift, stationary generating set, AC central/chiller, hydrant system, PABX, fire alarm, sound system gedung, audio & visual conference, CCTV dan pompa air.

Pengurangan sebesar Rp37.259.737.865,- merupakan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jembatan, jaringan komunikasi/data dan building automation system.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 32 :**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011**

MAK	Uraian	Jumlah (Rp)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	658.679.300
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	136.933.669
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>795.612.969</b>

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja Modal tidak sama dengan pencatatan Gedung dan Bangunan yaitu :

Keterangan	Jumlah
Penambahan Gedung dan Bangunan terkait BM Gedung dan Bangunan	
Pembelian	Rp 795.612.969
Jumlah	Rp 795.612.969
Penambahan Gedung dan Bangunan tidak terkait BM	
Belanja Barang yang Dikapitalisasi	Rp 55.597.400
Jumlah	Rp 55.597.400
<b>Total</b>	<b>Rp 851.210.369</b>

#### C.2.6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp39.031.009.925,- dan Rp1.771.272.060,-. Perbandingan Posisi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp39.031.009.925*

**Tabel 33 :**  
**Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	39.031.009.925	1.771.272.060	37.259.737.865
<b>TOTAL</b>	<b>39.031.009.925</b>	<b>1.771.272.060</b>	<b>37.259.737.865</b>

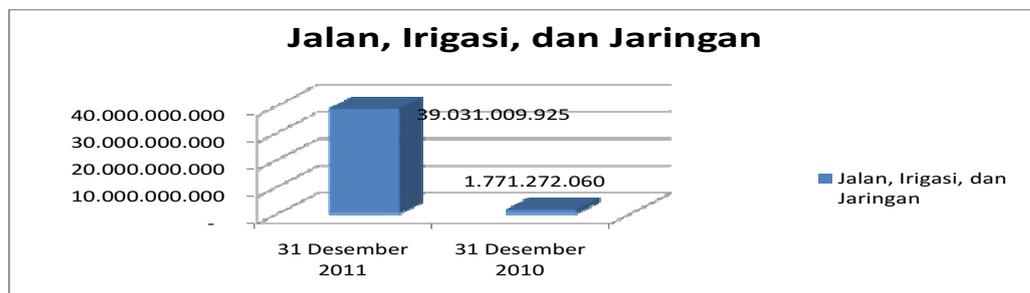
Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp37.259.737.865,- tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Penambahan :</b>	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 37.259.737.865
	<b>Rp 37.259.737.865</b>
<b>Jumlah Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp 37.259.737.865</b>

Penambahan sebesar Rp37.259.737.865,- merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa jembatan, jaringan komunikasi/data dan building automation system.

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 19 :**  
**Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Per 31 Desember 2011 dan 2010**



#### C.2.6.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp13.838.650.246,- dan Rp13.445.607.141,-.

Perbandingan Posisi Nilai Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 34 :**  
**Perbandingan Nilai Aset Tetap Lainnya**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	13.838.650.246	13.445.607.141	393.043.105
<b>TOTAL</b>	<b>13.838.650.246</b>	<b>13.445.607.141</b>	<b>393.043.105</b>

*Aset Tetap Lainnya  
Rp13.838.650.246*

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 35 :**  
**Perbandingan Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	13.512.931.576	12.329.035.126	1.183.896.450
Kartografi Naskah dan Lukisan	136.356.950	112.356.950	24.000.000
Barang Bercorak Kesenian	189.361.720	189.361.720	0
Peralatan Olah Raga	0	319.820.000	(319.820.000)
<b>Jumlah</b>	<b>13.838.650.246</b>	<b>12.950.573.796</b>	<b>888.076.450</b>
Renovasi Rumah Jabatan Hakim Milik Setneg	0	495.033.345	(495.033.345)
<b>Net Aset Tetap Lainnya</b>	<b>13.838.650.246</b>	<b>13.445.607.141</b>	<b>393.043.105</b>

Mutasi/perubahan Aset tetap Lainnya sebesar Rp393.043.105,- tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Penambahan :</b>	
- Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp 1.207.896.450
	<b>Rp 1.207.896.450</b>
<b>Pengurangan :</b>	
- Migrasi ke Peralatan dan Mesin	Rp 319.820.000
- Pengalihan nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan rumah jabatan hakim kepada Setneg	Rp 495.033.345
	<b>Rp 814.853.345</b>
<b>Jumlah Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp 393.043.105</b>

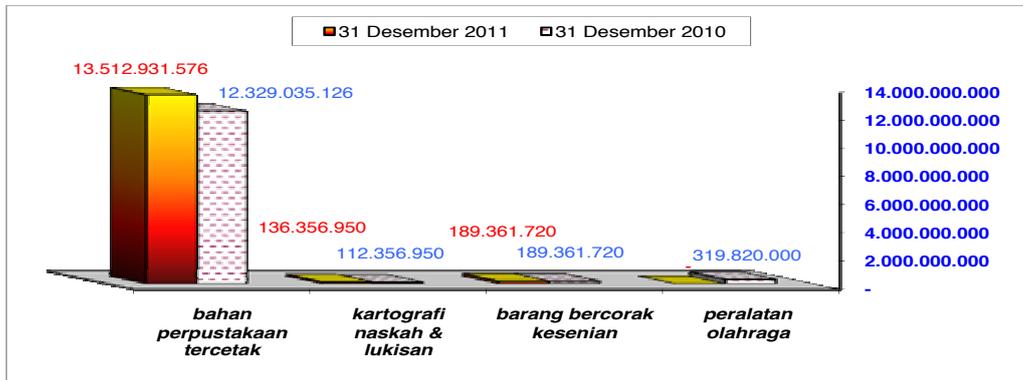
Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.207.896.450,- berasal dari Belanja Modal Fisik Lainnya, antara lain pengadaan lukisan hakim konstitusi sebesar Rp24.000.000,- serta pengadaan dan pengolahan buku elektronik perpustakaan sebesar Rp1.183.896.450,-.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp319.820.000,-, merupakan migrasi atas peralatan olahraga dari Aset tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp495.033.345,- merupakan penyerahan Aset Tetap Dalam Renovasi dari Mahkamah Konstitusi kepada Setneg sesuai berita acara cek fisik kapitalisasi gedung dan bangunan rumah dinas ketua, wakil ketua dan hakim konstitusi Nomor 001/BA/RT.01/I/2011 tanggal 21 Februari 2011, serta Surat Pengalihan Aset Nomor 160/PL.20/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat dilihat pada diagram berikut :

**Grafik 20:**  
**Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010**



### C.2.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai KDP per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp658.679.300,- dan Nihil, dengan rincian sebagai berikut :

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp658.679.300*

**Tabel 36 :**  
**Perbandingan Nilai KDP per 31 Desember 2011 dan 2010**

Eselon I	31 Des 2011 (Rp)	31 Des 2010 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	658.679.300	0	658.679.300
<b>TOTAL</b>	<b>658.679.300</b>	<b>0</b>	<b>658.679.300</b>

Saldo KDP per 31 Desember 2011 sebesar Rp658.679.300 merupakan pekerjaan jasa konsultasi perencana sebesar Rp589.200.000,- serta jasa konsultasi manajemen konstruksi sebesar Rp69.479.300,- atas pengembangan gedung dan asrama Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang pembangunan fisiknya baru akan direalisasikan di Tahun 2012. Proses pembangunan ini tertunda karena pembangunan yang awalnya direncanakan di daerah Bekasi tidak dapat terealisasi karena terhambat oleh sulitnya proses pembebasan tanah.

Mutasi/perubahan KDP sebesar Rp658.679.300,- tersebut adalah sebagai berikut:

Penambahan :	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 658.679.300
<b>Jumlah Mutasi/perubahan KDP</b>	<b>Rp 658.679.300</b>

### Aset Lainnya

#### C.2.7 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp9.113.179.441,- dan Rp6.631.081.717,-. Perbandingan posisi nilai Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Aset Lainnya Rp9.113.179.441*

**Tabel 37 :**  
**Perbandingan Nilai Aset Lainnya**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	9.113.179.441	6.631.081.717	2.482.097.724
<b>TOTAL</b>	<b>9.113.179.441</b>	<b>6.631.081.717</b>	<b>2.482.097.724</b>

Selama Tahun Anggaran 2011 mutasi tambah untuk akun Aset Lainnya sebesar Rp2.482.097.724,- adalah sebagai berikut :

<b>Penambahan :</b>		
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud	Rp	1.853.989.724
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas Aset Rusak Berat	Rp	628.108.000
	<b>Rp</b>	<b>2.482.097.724</b>
<b>Jumlah Mutasi/perubahan Aset Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>2.482.097.724</b>

Penambahan sebesar Rp1.853.989.724,- terdiri dari :

- Pengadaan sistem e-perisalah persidangan MKRI sebesar Rp491.940.130,-
- Pengadaan perangkat pengembangan ICT (aplikasi media monitoring) sebesar Rp981.284.304,-
- Pengadaan sistem aplikasi penelusuran asset BMN sebesar Rp348.425.290,-
- Software/aplikasi pada mesin absensi sebesar Rp32.340.000,-

Penambahan sebesar Rp628.108.000,- merupakan reklasifikasi dari peralatan dan mesin atas aset rusak berat.

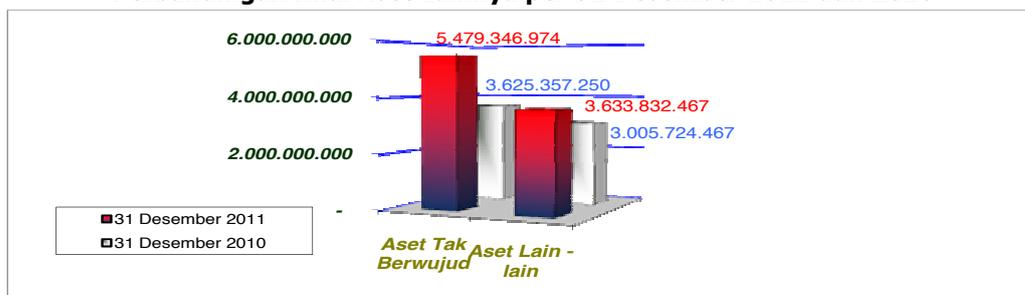
Rincian Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 38:**  
**Perbandingan Rincian Nilai Aset Lainnya**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Jenis Aset Lainnya</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan / (Penurunan) (Rp)</b>
Aset Tak Berwujud	5.479.346.974	3.625.357.250	1.853.989.724
Aset Lain-lain	3.633.832.467	3.005.724.467	628.108.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.113.179.441</b>	<b>6.631.081.717</b>	<b>2.482.097.724</b>

Nilai Aset lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 21 :**  
**Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010**



### C.2.7.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp5.479.346.974,- dan Rp3.625.357.250,- Perbandingan Posisi Nilai Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 39 :**  
**Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Software	1.853.989.724	0	1.853.989.724
Aset Tak Berwujud Lainnya	3.625.357.250	3.625.357.250	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.479.346.974</b>	<b>3.625.357.250</b>	<b>1.853.989.724</b>

Aset Tak Berwujud Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp5.479.346.974,- terdiri atas :

<b>Jenis Aset Tak Berwujud</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1. Sistem e-perisalah persidangan MKRI (e-perisalah)	2011	491.940.130
2. Software Perangkat Pengembangan ICT (sistem aplikasi media monitoring)	2011	981.284.304
3. Sistem Aplikasi Penelusuran Aset BMN	2011	348.425.290
4. Software/Aplikasi Absensi	2011	32.340.000
5. Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL)	2007	520.000.000
6. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS)	2007	520.000.000
7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	2007	520.000.000
8. Pusat Informasi Hukum (PIH)	2007	520.000.000
9. Sistem Informasi Dokumentasi (SIMDOK)	2007	520.000.000
10. Sistem Informasi Term Of Reference (SIMTOR)	2007	520.000.000
11. Website Mahkamah Konstitusi RI	2007	505.357.250
<b>JUMLAH</b>		<b>5.479.346.974</b>

Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.853.989.724,- tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Penambahan :</b>	
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud	Rp 2.128.390.298
	<b>Rp 2.128.390.298</b>
<b>Pengurangan :</b>	
- Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud	Rp 274.400.574
	<b>Rp 274.400.574</b>
<b>Jumlah Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp 1.853.989.724</b>

Pengurangan sebesar Rp274.400.574,- adalah koreksi nilai Aset Tak Berwujud berupa belanja jasa pelabelan dan penelusuran aset BMN.

### C.2.7.2 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2011 dan 2010 masing - masing sebesar Rp3.633.832.467,- dan Rp3.005.724.467,-.

Perbandingan Posisi Nilai Aset Lain - Lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 40 :**  
**Perbandingan Nilai Aset Lain - Lain**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	3.633.832.467	3.005.724.467	628.108.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.633.832.467</b>	<b>3.005.724.467</b>	<b>628.108.000</b>

Kenaikan aset Lain - Lain sebesar Rp628.108.000,- merupakan reklasifikasi dari peralatan dan mesin atas barang rusak berat, yaitu alat laboratorium, yang akan dihapuskan.

## KEWAJIBAN

### Kewajiban Jangka Pendek

#### C.2.8 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp10.055.990,- dan Rp93.870.566,-.

*Utang Kepada  
Pihak Ketiga  
Rp10.055.990*

Perbandingan Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 41 :**  
**Perbandingan Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	10.055.990	93.870.566	(83.814.576)
<b>TOTAL</b>	<b>10.055.990</b>	<b>93.870.566</b>	<b>(83.814.576)</b>

Utang kepada Pihak Ketiga adalah berupa belanja pegawai Tahun Anggaran 2011 yang belum dibayar, yang terdiri dari :

1. Kekurangan tunjangan beras bagi PNS dan CPNS MKRI bulan Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp10.000.888,-
2. Kekurangan gaji PNS MKRI atas KGB bulan Desember 2011 sebesar Rp55.102,-

### C.2.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp93.108.000,- dan Rp93.108.000,-.

*Pendapatan  
Diterima dimuka  
Rp93.108.000*

Perbandingan Posisi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 42 :**  
**Perbandingan Nilai Pendapatan Diterima Dimuka  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	93.108.000	93.108.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>93.108.000</b>	<b>93.108.000</b>	<b>0</b>

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan Sewa gedung Serba Guna dan Pusdiklat di Bekasi, serta ruang gedung Mahkamah Konstitusi yang disewakan kepada Koperasi Konstitusi yang ditetapkan dengan surat perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dan Koperasi Konstitusi dan telah disetorkan ke kas negara. (Surat Perjanjian dan SSBP terlampir)

## EKUITAS

### Ekuitas Dana Lancar

#### C.2.10 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp34.719.731,- dan Nihil. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak (*Netto*).

*Cadangan Piutang  
Rp34.719.731*

Perbandingan Posisi Nilai Cadangan Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 43 :**  
**Perbandingan Nilai Cadangan Piutang  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	34.719.731	0	34.719.731
<b>TOTAL</b>	<b>34.719.731</b>	<b>0</b>	<b>34.719.731</b>

### C.2.11 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing Rp1.475.252.202,- dan Rp1.704.525.837,- adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / kewajiban jangka pendek. Akun ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan. Perbandingan Posisi Nilai Cadangan Persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Cadangan  
Persediaan  
Rp1.475.252.202*

**Tabel 44 :**  
**Perbandingan Nilai Cadangan Persediaan  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	1.475.252.202	1.704.525.837	(229.273.635)
<b>TOTAL</b>	<b>1.475.252.202</b>	<b>1.704.525.837</b>	<b>(229.273.635)</b>

### C.2.12 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar (Rp10.055.990) dan (Rp93.870.566),-. Akun ini merupakan penyeimbang akun Utang kepada Pihak Ketiga.

*Dana yg Harus  
disediakan utk  
pembayaran  
Utang Jangka  
Pendek  
(Rp10.055.990)*

Perbandingan Posisi Nilai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 45 :**  
**Perbandingan Nilai Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek  
per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	(10.055.990)	(93.870.566)	83.814.576
<b>TOTAL</b>	<b>(10.055.990)</b>	<b>(93.870.566)</b>	<b>83.814.576</b>

### C.2.13 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar (Rp93.108.000,-) dan (Rp93.108.000,-).

*Barang/Jasa yang  
Masih Harus  
Diserahkan  
(Rp93.108.000)*

Perbandingan Posisi Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 46 :**  
**Perbandingan Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	(93.108.000)	(93.108.000)	0
<b>TOTAL</b>	<b>(93.108.000)</b>	<b>(93.108.000)</b>	<b>0</b>

Akun ini merupakan penyeimbang akun Pendapatan Diterima Dimuka, yang merupakan Pendapatan Sewa gedung Serba Guna dan Pusdiklat di Bekasi, serta ruang gedung Mahkamah Konstitusi yang disewakan kepada Koperasi Konstitusi yang ditetapkan dengan surat perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dan Koperasi Konstitusi dan telah disetorkan ke kas negara.

## Ekuitas Dana Investasi

### C.2.14 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 30 Juni 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp500.917.178.615,- dan Rp477.125.286.670,-. Akun ini merupakan akun penyeimbang akun Aset Tetap.

*Diinvestasikan dlm  
Aset Tetap  
Rp500.917.178.615*

Perbandingan Posisi Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 47 :**  
**Perbandingan Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	500.917.178.615	477.125.286.670	23.791.891.945
<b>TOTAL</b>	<b>500.917.178.615</b>	<b>477.125.286.670</b>	<b>23.791.891.945</b>

### C.2.15 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp9.113.179.441,- dan Rp6.631.081.717,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya.

*Diinvestasikan dlm  
Aset Lainnya  
Rp9.113.179.441*

Perbandingan Posisi Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 48 :**  
**Perbandingan Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**  
**per 31 Desember 2011 dan 2010**

<b>Eselon I</b>	<b>31 Des 2011 (Rp)</b>	<b>31 Des 2010 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	9.113.179.441	6.631.081.717	2.482.097.724
<b>TOTAL</b>	<b>9.113.179.441</b>	<b>6.631.081.717</b>	<b>2.482.097.724</b>

### C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 adalah Nihil. Seluruh Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi telah disetor ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Langkah - Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011.
2. Berdasarkan diterbitkannya PMK Nomor 29/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, terdapat perubahan database SIMAK-BMN 2010 dan Aplikasi Persediaan 2010 di pertengahan Tahun Anggaran 2011. Hal ini menyebabkan adanya migrasi atas konversi kodefikasi BMN.
3. Pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 terdapat perbedaan antara saldo per 31 Desember 2011 (Audited) dengan Saldo per 1 Januari 2011 pada Laporan Pengguna Barang, dikarenakan proses Migrasi pada SIMAK-BMN di Tahun 2011, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Saldo pada akun Peralatan dan Mesin dan akun Aset Tetap Lainnya Intrakomptabel sebesar Rp319.820.000,- dikarenakan adanya koreksi pindah akun hasil migrasi atas peralatan olahraga dari Aset tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN.
  - b) Saldo pada akun Peralatan dan Mesin Intrakomptabel, sub akun Alat Studio dan sub akun Peralatan Komputer sebesar Rp38.576.071 dikarenakan adanya koreksi pindah sub akun hasil migrasi pada SIMAK-BMN.

*Catatan Penting Lainnya*

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sesuai dengan Surat Auditor Utama Keuangan Negara III, Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor 148/S/XVI/05/2010 tanggal 18 Mei 2011 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi Tahun Anggaran 2010, terdapat temuan pemeriksaan sebagai berikut :

*Pengungkapan Penting Lainnya*

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Gedung MKRI, Rumah Dinas MKRI,

Rumah Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan Kontrak dan terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp196.790.000.

2. Pencatatan Persediaan Belum Tertib.
3. Kontrak Pengadaan Buku-buku Perpustakaan berupa *E-Book* TA 2010 masih lemah.

Atas temuan pemeriksaan tersebut, telah di tindak lanjuti dengan :

1. a. Memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada ULP, Panitia Penerima Barang/Jasa, PPK dan Pelaksana Pekerjaan untuk lebih memperhatikan ketentuan terkait pengadaan barang/jasa.
- b. Menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp196.797.735,- kepada PT PP Dirganeka dan menyetorkannya ke rekening kas negara.
2. a. Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Bagian Perlengkapan agar lebih cermat dalam mengelola dan menatausahakan persediaan.
- b. Menerbitkan surat peringatan kepada ULP agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Meminta surat jaminan pemeliharaan *e-book* kepada principal sebagai jaminan bahwa seluruh *e-book* tersebut dapat diakses sampai batas waktu yang tidak terbatas.

Dengan demikian hasil temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2010 telah selesai ditindak lanjuti.

Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir.

## D.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Mahkamah Konstitusi RI yang dipertahankan adalah rekening pada Bank Rakyat Indonesia cabang Veteran Jakarta Pusat dengan nomor rekening 0329-01-001469-30-6, sesuai dengan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I melalui surat nomor S-2741/WPB.11/KP.01/2007 tanggal 10 Oktober 2007.

Sedangkan Rekening Mahkamah Konstitusi RI yang ditutup adalah rekening pada Bank Mandiri cabang Wisma Allia Jakarta Pusat dengan nomor rekening 123-00-0454107-6.

Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir.

*Rekening  
Pemerintah*

## D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

*Informasi  
Pendapatan dan  
Belanja Secara  
Akrual*

Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari :

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi :

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Transaksi Pendapatan akrual yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi adalah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp93.108.000,- yang merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan untuk periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2012. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui perjanjian sewa menyewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan bangunan antara Mahkamah Konstitusi dengan Koperasi Konstitusi Nomor 020/PK/2011 dan 015.1/Kop.Kons/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp186.216.000,- selama satu tahun untuk periode 1 Juli 2011 s.d. 30 Juni 2012. (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Transaksi Belanja akrual yg terdapat pada Mahkamah Konstitusi adalah belanja pegawai sebesar Rp10.055.990,- yang terdiri dari :

3. Kekurangan tunjangan beras bagi PNS dan CPNS MKRI bulan Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp10.000.888,-
4. Kekurangan gaji PNS MKRI atas KGB bulan Desember 2011 a.n. Agusniwan Etra sebesar Rp55.102,-

Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilampirkan sebagaimana format terlampir.

#### **D.4. PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN**

1. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia; Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 PO Box 999 JKT 10000 Telp (021) 2352 9000 Fak (021) 352-0177 [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan perubahan nama Eselon I yang semula Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI menjadi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
3. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

*Pengungkapan  
Lain - Lain*

Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, disebutkan bahwa :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
    - Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - Memutus pembubaran partai politik; dan
    - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  - b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

Menidaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi Tanggal 29 Oktober 2008.

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110  
Telp. (021) 2352 9000; Faks. (021) 3520 177  
P.O. Box. 999 Jakarta 10110  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)